

PERANAN AMIEN RAIS DALAM GERAKAN REFORMASI
DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh:

Dwi Ayu Prastiti

NIM. 960910101168

Pembimbing I:

Drs. Umaid Radi, M.A

Pembimbing II:

Drs. Achmad Habibullah, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2000

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Asal : Hadiah

16 NOV 2000

Terima Tel:

No. Induk : 10 833 30-

Klas

S
357
DWH
p

e.1 20

PERANAN AMIEN RAIS DALAM GERAKAN REFORMASI
DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh:

Dwi Ayu Prastiti

Nim. 960910101168

Pembimbing I

Drs. Umaid Radi, M.A

Pembimbing II

Drs. Achmad Habibullah, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2000

PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan Panitia Penguji
Skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana Strata Satu
Jurusan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional

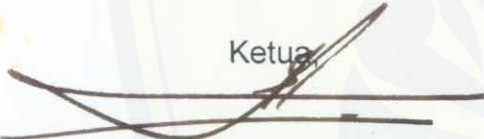
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada hari : Sabtu
Tanggal : 14 Oktober 2000
Pukul : 08.00 WIB

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Drs. H. Bariman
Nip. 130 350 769


Drs Umaldi Radi, M.A
Nip. 130 239 058

Susunan Panitia Penguji:

1. Prof. Drs. H. Bariman (.....)
2. Drs. Umaldi Radi, M.A (.....)
3. Drs. Nuruddin M. Yasin (.....)
4. Drs. Sjoekron Syah, S.U (.....)
5. Drs. Achmad Habibullah, M.Si (.....)

Mengetahui,
Dekan,


Drs. H. Moch. Toerki
Nip. 130 524 832



Motto:

*Word I was in my life alone,
Word I had no one left but God.*

*(Robert Frost)**

* Laurence Perrine, *Literature, Structure, Sound and Sense*, Harcourt Braco Javanovich Publishers, San Diego, 1988, hal. 567.

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

1. *Ibunda Dra. Hartati dan Ayahanda Ir. Soeroso (Alm), yang tak kunjung henti dengan kasih sayang dan do'a;*
2. *Kakakku Dyah Ayu Prastiwi, S.Psi;*
3. *Kemenakanaku Tita tersayang;*
4. *Almamaterku, tempatku memperoleh banyak hal;*
5. *Belahan jiwaku yang selalu memberi arti, Jakfar Sadik, S.E tercinta.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah, SWT, atas rahmad, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuannya baik secara moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Bpk. Drs. Umaid Radi, M.A, selaku dosen pembimbing I dan Bpk. Drs. Achmad Habibullah, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan perhatiannya pada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Bpk. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan FISIP, Universitas Jember.
3. Bpk. Drs. Sjoekron Syah, S.U, selaku Kajar Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember.
4. Segenap dosen dan karyawan FISIP, Universitas Jember, atas ilmu pengetahuan dan pelayanannya yang diberikan selama masa kuliah.
5. Ibunda Hartati tercinta, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta do'a yang tulus demi keberhasilan putrinya.
6. Kakakku Dyah Ayu Prastiwi dan Kakak Lukmansyah atas dukungan serta semangatnya.
7. Kemenakan tersayang, Chikitha Rahmadhani Lukman atas do'a bersama yang memberikanku kekuatan.
8. Kakanda terkasih, Jakfar Sadik, S.E, terimakasih atas semua ketulusan, kesabaran, kebahagiaan, kasih sayang, serta cinta saat kita berbagi segalanya.

9. Sahabat-sahabatku, Elies yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi, serta Elok yang selalu membuat keadaan menjadi ceria. Terima kasih atas persahabatan yang indah.
10. Yuni sebagai sahabat terbaik dalam suka maupun duka, dan Nurul yang selalu membuatku “fresh”, serta Nyun-nyun ade' khos yang baik.
11. Rekan-rekan Jl. Jawa IVB/6, Uyin, Atik, Mbak Ika, dhe' Murni, dll, atas kebersamaanya selama ini.
12. Teman seperjuangan, HI '96, Luluk, Syamsu, Novi, Fenny, Eli, Vivin, Hexa, Agus, Lukman dan semuanya.
13. Semua sahabat dan saudara yang tidak penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan do'a atas keberhasilan penulis.

Akhirnya hanya Allahlah yang dapat membalas kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Jember, Oktober 2000

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman judul.....	i
Halaman pengesahan.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Alasan pemilihan judul.....	1
1.2 Ruang lingkup pembahasan.....	6
1.2.1 Batasan waktu.....	7
1.2.2 Batasan materi.....	7
1.3 Problematika.....	8
1.4 Kerangka dasar teori.....	9
1.5 Hipotesa.....	13
1.6 Metode penelitian.....	15
1.6.1 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.6.2 Metode Analisa Data.....	16
1.6.3 Metode Pendekatan.....	17
BAB II Gambaran Umum tentang Amien Rais.....	18
2.1 Latar Belakang Amien Rais.....	18
2.2 Pendidikan Amien Rais.....	21
2.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Amien Rais.....	25
BAB III Pemikiran Politik Amien Rais.....	32
3.1 Tauhid Sosial.....	32
3.2 High Politik.....	37
3.3 Suksesi.....	40

BAB IV Peranan Amien Rais dalam Gerakan Reformasi di Indonesia	45
4.1 Amien Rais dalam Masa Transisi.....	45
4.1.1 Amien Rais Sebagai Aktor Politik.....	45
4.1.2 Keinginan Mewujudkan Demokrasi.....	50
4.1.3 Keadaan Indonesia.....	57
4.2 Amien Rais Menjelang Pemilu.....	62
4.2.1 Sejarah Berdirinya Partai Amanat Nasional.....	62
4.2.2 Dinamika politik Partai Amanat Nasional.....	65
4.3 Sidang Umum MPR 1999.....	67
4.3.1 Benturan Habibie-Megawati.....	69
4.3.2 Terbentuknya Poros tengah.....	74
4.3.3 Amien Rais Terpilih Sebagai Ketua MPR Periode 1999-2004.....	77
BAB V KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	85

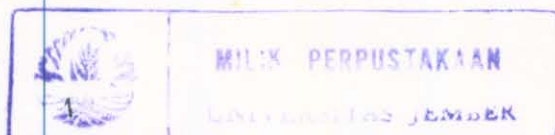
BAB I PENDAHULUAN

1.1 ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Fenomena politik yang terjadi di Indonesia terutama pada era reformasi merupakan kajian politik yang menarik untuk disimak dan dianalisa secara khusus dan penuh perhitungan. Karena selama ini Indonesia terjerebab ke dalam sistem politik otoriter dibawah rezim Orde Baru, kini muncul sebuah harapan baru dengan orde reformasi yang diharapkan bisa bergulir dengan mulus.

Gagasan Amien yang cukup kontroversial seputar isu suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1995, menimbulkan banyak pihak yang 'terperanjat' dengan gagasannya mengingat Soeharto masih sangat kuat dan berkuasa, sehingga pergantian kepemimpinan nasional tentu sangat sensitif dan beresiko politik tinggi. Amien demikian yakin suksesi sebagai alternatif politik terbaik bila bangsa ini hendak keluar dari berbagai krisis ekonomi politik yang menimpanya. Suksesi merupakan suatu keharusan, karena dalam pandangan Amien, kekuasaan Soeharto sudah terlampau lama (tiga dekade, sejak 1967-1998). Soeharto sendiri secara alamiah telah mengalami keletihan (exhausted) dalam mengelola politik kenegaraan. Kekuasaannya yang nyaris tidak terbatas (mutlak) menyebabkan Soeharto cenderung korup, sewenang-wenang. Mengutip sejarahwan Inggris, Lord Acton, Amien berpendapat 'kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak cenderung akan korup secara mutlak'.¹ Keinginan agar terjadi suksesi pada tahun 1998 adalah berdasar pada realitas empiris kehidupan akhir-akhir ini. Walaupun Orde Baru telah membangun beberapa prestasi seperti stabilitas

¹ Tim LIP FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru: Reformasi UU Partai Politik*, Mizan Pustaka, 1998, hal.178-179.



moneter dan pertumbuhan ekonomi yang mantap (walaupun memiliki dasar yang rapuh), kemampuan Indonesia untuk berswasembada pangan, persatuan dan kesatuan yang membanggakan, citra Internasional terhadap Indonesia meningkat lebih baik dan stabilitas politik yang relatif mantap. Namun disisi lain, terdapat penyakit kronis yang mengental dalam perjalanan kehidupan bangsa beberapa puluh tahun terakhir ini. Diantaranya yaitu; *Pertama*, walaupun adanya pertumbuhan ekonomi yang sudah cukup baik, realitas kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi fenomena yang tidak mudah dipecahkan. Jurang pemisah antara yang kaya dan miskin masih sangat lebar. *Kedua*, korupsi telah merajalela bahkan semakin gawat dari tahun ke tahun. *Ketiga*, proses demokratisasi masih jauh dari apa yang kita harapkan. Sedangkan skenario suksesi yang diinginkan, menurut Amien harus melalui tahap-tahap sebagai berikut: *Pertama*, dilakukan dengan perubahan-perubahan sistem pemilu, sistem keanggotaan DPR/MPR dan perubahan dalam berbagai hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden agar betul-betul demokratis. *Kedua*, sistem politik yang telah dipertahankan, diikuti dengan keterbukaan agar aspirasi masyarakat bisa dideteksi dengan mudah.²

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997 mengakselerasi delegitimasi Orde Baru. Krisis ini akibat praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), merosotnya rupiah dihadapan dolar AS, krisis kepercayaan dari elite birokrat Orde Baru, pelaku politik domestik dan internasional terhadap Soeharto. Karena menurut Amien Rais, pemerintahan sah apabila memiliki legitimasi politik, ekonomi dan moral dari rakyatnya. Tidak stabilnya perekonomian dan tidak stabilnya harga-harga serta inflasi, menjadi petunjuk

² Sutipyo R. dan Asmawi, *PAN: Titian Amien Rais Menuju Istana, Titian Illahi Press*, Yogyakarta, 1999, hal.17-21

tidak terpenuhinya legitimasi ekonomi. Sementara dengan maraknya korupsi menunjukkan bahwa legitimasi moralpun telah tiada.³

Apabila krisis ekonomi terus berlanjut, Amien Rais menyatakan dirinya bersedia memimpin *people power* tanpa kekerasan seperti yang terjadi di Filipina dan Iran, hal ini dinyatakan Amien Rais ketika menjawab pertanyaan seorang mahasiswa yang naik ke atas mimbar di ruang terbuka di halaman Fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta, 16 Maret 1998. Pada kesempatan ini, Forum Mahasiswa Reformasi (*formasi*) menyampaikan pernyataan sikap berupa 13 tuntutan terhadap pemerintah.⁴

Malam hari menjelang 20 Mei 1998, hari kebangkitan nasional, demikian menegangkan sebab beredar rumor akan terjadi pertumpahan darah di Jakarta. Gerakan *people power* yang dipimpin oleh Amien dan rekan-rekannya di Jakarta (lapangan monas) akan dihadapi Angkatan Bersenjata dengan cara kekerasan. ABRI menilai aksi gerakan massa 20 Mei itu sebagai "ancaman serius" bagi keamanan pemerintah Soeharto dan stabilitas nasional. Pada malam tanggal 19 Mei, Amien Rais berkeliling Jakarta, khususnya kawasan Monas untuk meninjau siaga militer menghadapi aksi massa tanggal 20 Mei 1998. Menyaksikan demikian seriusnya ABRI mengantisipasi rencana aksi *people power*nya itu, Amien segera membatalkan rencananya melalui pengumuman di berbagai stasiun televisi. Itu dilakukan, semata-mata demi menghindari pertumpahan darah.

Meskipun aksi massa 20 Mei dibatalkan, gerakan menuntut reformasi terus bergulir. Tuntutan reformasi saat itu adalah agar Soeharto segera mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan. Demikian kuat tuntutan reformasi, akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie di Istana Negara. Turunnya Soeharto dari jabatan

³ Kompas, 12-5-1998, hal.3

⁴ Kompas, 17-3-1998, hal. 3

kepresidenan yang menandai "kemenangan" perjuangan kaum reformis sempat menimbulkan kontroversi soal sah tidaknya cara peralihan kekuasaan dari Soeharto ke Habibie. Orde Baru runtuh digantikan Orde Reformasi.⁵

Sementara itu, Amien Rais bersikap lebih bijaksana, dimana ia memberikan kesempatan kepada pemerintahan Habibie sebagai "pemerintahan transisi" yang bertugas mengantarkan kepada terbentuknya pemerintahan baru.⁶ Oleh Karena itu, masyarakat diharapkan tidak perlu risau. Yang penting adalah memberikan kesempatan kepada pemerintah Habibie untuk mengatasi masalah yang mendesak, disamping itu juga memberikan kesempatan pada kabinet reformasi untuk mengadakan berbagai Undang-Undang Politik, dan kemudian mendorong untuk segera dilaksanakannya pemilu yang luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jujur (jujur dan adil).⁷ Mengenai kesempatan yang diberikan kepada presiden Habibie untuk mengantarkan bangsa ini kepada suatu pemerintahan yang bebas KKN, Amien Rais mengatakan cukup enam bulan atau paling lama satu tahun.⁸ Amien Rais juga menyatakan bahwa dirinya akan menjadi *sparring partner* bagi pemerintahan Habibie. Dimana Habibie didalam kekuasaan, dan Amien berada di luar akan terus mengoreksi dan mengkritik.⁹

Orde Reformasi merupakan angin segar bagi wacana kehidupan perpolitikan Indonesia. Kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan dari rasa takut mulai didapatkan, disamping itu Habibie juga memberikan peluang kepada semua pihak untuk berkiperah dalam dunia politik, dimana semua pihak diperbolehkan mendirikan partai politik baru

⁵ Tim LIP FISIP UI, Op. Cit, hal. 181.

⁶ Sutipyo dan Asmawi, Op. Cit, 1999, hal.51.

⁷ Ir. Muhammad Najib, *Amien Rais Sang Demokrat*, Gema Insani, Jakarta, hal. 121.

⁸ Sutipyo dan Asmawi, Op Cit, hal. 55.

⁹ Bambang Trimansyah, *Episode Sang Oposan: Lokomotif Itu Bernama Amien Rais*, Zaman Wacana Mulia, 1998, hal. 58.

selama berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempersoalkan SARA.¹⁰

Amien Rais sebagai lokomotif reformasi mulai menghitung langkah. Agar reformasi bisa digiring secara total maka diperlukan partai politik. Untuk itu Amien Rais berupaya untuk mendirikan partai politik baru. Walaupun pada awalnya, ia mendapat tawaran dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Tapi akhirnya Amien Rais memilih mendirikan partai baru yang terbuka. Dalam sebuah pertemuan di Wisma Tempo Sinar Galih Puncak, disepakati pendirian Partai Amanat Bangsa (PAB) yang diganti menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) dan dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998.¹¹ Partai baru ini didukung oleh sejumlah rekannya yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MAR), kelompok Tiber Timur Raya (Tertita), Pusat Pengkajian dan Strategi Kebijakan (PPSK) serta beberapa LSM dan tokoh intelektual.

Platform PAN secara sederhana terangkum dalam tiga kata kunci : Majemuk, Demokrasi dan Keadilan. PAN adalah partai politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajemukan dan keadilan sosial, sedangkan cita-cita PAN berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan.¹²

Menjelang Sidang Istimewa MPR 10-13 November 1998, politik semakin memanas, terutama antara pro dan anti Habibie. Walaupun Perolehan suara PAN pada Pemilu 1999 tidak memenuhi target, Amien sebagai Ketua PAN tidak menyerah begitu saja, Amien mulai berupaya untuk mengadakan koalisi dengan partai-partai lain dalam Sidang Umum MPR, kondisi ini dikenal dengan Poros Tengah. Kekuatan poros tengah timbul karena adanya dua kubu yang saling bertentangan antara Megawati dan

¹⁰ Sutipyo dan Asmawi, *Op. Cit*, hal. 106.

¹¹ Forum Keadilan, 6 Juni 1999, hal. 23 - 25.

¹² Sutipyo R & Asmawi, *Op. Cit*, hal. 133 - 134.

Habibie. Dalam poros tengah ia mulai mengumpulkan dukungan baginya dengan membangun kepercayaan dari partai-partai lain serta beraliansi jangka pendek dengan mereka. Posisi poros tengah ini semakin solid dan kuat, yang mana pada akhirnya mengantarkan Amien Rais untuk dapat duduk dalam jabatan Ketua MPR periode 1999-2004.

Oleh karena fenomena Amien Rais dalam percaturan politik nasional yang demikian menarik ini, penulis akhirnya merasa terdorong untuk lebih jauh menganalisa lebih mendalam tentang Amien Rais dan alasan tersebut telah menjadi pertimbangan penulis untuk mengambil judul skripsi :

“PERANAN AMIEN RAIS DALAM GERAKAN REFORMASI DI INDONESIA”

1.2. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Dalam penulisan ilmiah perlu ada pembatasan terhadap masalah yang akan dijadikan obyek pembahasan yang sangat diperlukan dalam penulisan ilmiah. Pembatasan ini dimaksudkan agar penulisan tidak menyimpang dari inti permasalahan serta untuk menghindari kekaburan arti pembahasan yang terlalu meluas sehingga mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah suatu penulisan dan mengalami kerancuan, sebagaimana yang dikatakan oleh Sutrisno Hadi :

“Sekalipun suatu persoalan telah ditetapkan maka berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi-formulasi yang tegas terhadap pokok permasalahan/persoalan tersebut. Bagi peneliti, penegasan batas-batas ini akan menjadi pedoman kerja bagi orang lain kepada siapa laporan penelitian itu hendak disajikan atau diserahkan, penegasan selalu berfungsi mencegah timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah.”¹³

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 8.

Dalam melakukan pembatasan ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penulis, yaitu mengenai batasan waktu dan batasan materi. Untuk itu penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut :

1.2.1. Batasan Waktu

Batasan waktu ini ditekankan pada kurun waktu tertentu, yaitu mulai pada saat perjuangan reformasi yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada bulan Mei 1998 dimana kekuatan mahasiswa atas prakarsa Amien Rais berhasil menggulingkan pemerintah rezim Orde Baru sampai dengan berlangsungnya Sidang Umum MPR dimana Amien Rais berhasil menduduki jabatan sebagai Ketua MPR periode 1999-2004, pada bulan Oktober 1999.

1.2.2. Batasan Materi

Pada batasan materi ini penulis lebih menekankan pada masalah seputar pesan Amien Rais yang berupa tindakan-tindakan nyata (keterlibatan) atau pengaruh (lebih bersifat persuasif) sebagai lokomotif reformasi terhadap jalannya reformasi yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu penulis juga akan membahas tentang kedudukan dan pengaruh Amien Rais secara umum, termasuk didalamnya dukungan masyarakat terhadap Amien Rais.

Dalam konteks tersebut, penulis akan menganalisa pola pikiran Amien Rais untuk memberi gambaran umum tentang keterlibatan Amien Rais. Disamping itu perlu kiranya untuk menyertakan latar belakang akademis Amien Rais yang membuat dia bertindak kritis agar reformasi dapat berjalan lancar.

1.3. PROBLEMATIKA

Problematika pada dasarnya merupakan suatu hal yang pertama kali harus dipikirkan oleh seorang peneliti sebelum memulai suatu penelitian. Karena itu inti permasalahan atau problematika ini akan menggerakkan penulis dalam mencari jawaban yang akurat.

Problematika didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang merintangikan kita untuk memecahkannya dengan metode-metode tertentu, karena itu setiap masalah harus dicarikan jalan keluarnya.

Selanjutnya batasan pengertian masalah menurut M. Hatta adalah sebagai berikut :

*"Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas hanya dengan melihatnya saja, melainkan ingin mengetahuinya lebih dalam salah berhubungan dengan ilmu ilmu senantiasa mengemukakan pernyataan tentang bagaimana dan apa sebabnya."*¹⁴

Sedangkan menurut Winarno Surachmad mengatakan:

*"Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita ingin jalan terus."*¹⁵

Pada 21 Mei 1998, sebagai awal orde reformasi. Soeharto dengan tegas menyatakan dirinya berhenti menjadi presiden, maka Habibie sebagai Wakil Presiden langsung naik menggantikannya sebagai presiden.

Tuntutan reformasi tidak pernah berhenti walaupun sekejap. Habibie sebagai pemegang tampuk pimpinan di negeri harus bekerja keras mengatasi berbagai persoalan karena berbagai persoalan di masyarakat semakin kompleks. Masyarakat memang tidak akan pernah puas, sebelum

¹⁴ The Liang Gie, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Fisip UGM, Yogyakarta, 1984, hal. 49.

¹⁵ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*, CV. Tarsito, Bandung, 1975, hal. 33.

seluruh tuntutan dipenuhi oleh pemerintah Habibie. Dalam hal ini Amien Rais berusaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan tuntutan rakyat melalui statement-statement maupun kritikan yang dilontarkan kepada pemerintahan transisi agar reformasi tidak keluar dari jalurnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berusaha memuat perumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah peranan Amien Rais dalam gerakan reformasi di Indonesia?”

1.4. KERANGKA DASAR TEORI

Sebagai pedoman untuk bertindak dalam mengumpulkan dan menguji data serta memecahkan dan menganalisis permasalahan maka penggunaan teori sangat penting dalam penelitian ilmiah. Landasan teori yang ada digunakan untuk menjembatani antara problematika dengan hipotesa yang penulis ajukan serta alat analisa yang disusun dalam suatu kerangka yang teratur seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Mas'ood :

“Teori sebagai suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi teori adalah suatu bentuk penjelasan terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu teori adalah suatu bentuk pernyataan sebagai upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.”¹⁶

Sedangkan menurut Jack C. Plano, pengertian teori secara umum sebagai berikut :

“Suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan atau anjuran pada setiap bidang penelitian. Dalam ilmu pengetahuan yang empiris (termasuk ilmu politik) teori mengacu pada kaitan logis pada perangkat proposisi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan atau meramalkan atau kedua-keduanya.”¹⁷

¹⁶ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Methodologi*. LP3S, Yogyakarta, 1994 hal. 186.

¹⁷ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 266.

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam tulisan ini, penulis menggunakan Teori Peranan (Role Theory). Menurut Mochtar Mas'oe'd yang dimaksud dengan peranan adalah:

*"Peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan atau dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan posisi itu."*¹⁸

Teori peranan berasumsi bahwa seseorang yang menduduki peranan tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan (expectation) itulah yang membentuk suatu peranan. *Sopo le ..*

Menurut Alan Isaak, Harapan itu bisa muncul dari dua sumber. *Pertama*, bisa berasal dari harapa yang dipunyai orang lain terhadap seorang aktor. Artinya setiap orang atau masyarakat pasti memiliki gagasan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor. Gagasan masyarakat ini dinyatakan dalam konstitusi, Undang-Undang, opini publik dan norma-norma kultural. *Kedua*, harapan itu bisa juga muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapan sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan. Artinya ia memiliki gagasan sendiri tentang peranan yang harus dimainkannya. Gagasan ini sebagian besar mencerminkan sikap, ideologi dan kepribadian sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, serta pengalaman dari seorang aktor.

Berangkat dari asumsi bahwa politik seringkali dipengaruhi oleh suatu faktor penting yang secara sederhana disebut "personality", dimana aktor politik tampak lebih menonjol secara individual dan mempengaruhi jalannya kehidupan politik. Untuk itu agar dapat mengkaji Amien Rais yang tidak terlepas dari peranan individunya, maka analisa kepribadian sang aktor

(Amien Rais) akan sangat berarti. Disini penulis menggunakan *Teori Personality and Politics*.

Dalam mengkaji *personality and politics*, pada dasarnya terbagi atas tiga bentuk, yaitu:

1. Single case (kasus aktor tunggal); yaitu analisa psikologis terhadap aktor tunggal secara individual.
2. Tipological (multi-case); yaitu analisa psikologis terhadap beberapa aktor politik.
3. Agregation; yaitu analisa mengenai pengaruh dari berbagai individu dan tergantung pada fungsionalisasi lembaga politik.¹⁹

Untuk keperluan penulisan ini, penulis menggunakan alat analisa yang pertama, yaitu single case. Single case meliputi pendalaman studi terhadap anggota bagian masyarakat, biografi psikologis publik figur.

Dalam studi ini terdapat pula lima variabel yang sangat relevan:

1. Sistem sosial dan politik yang ada dalam lingkungan aktor tunggal.
2. Dasar terbentuknya *personality* aktor tunggal, seperti informasi mengenai pengaruh lingkungan terdahulu yang dapat membentuk aktor tunggal secara psikis.
3. Ciri-ciri psikologis yang meliputi sikap dan *personality*.
4. Lingkungan terdahulu yang dapat mempengaruhi perilaku.
5. Fokus analisa itu sendiri.

Pengamatan aktor tunggal secara operasional dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Phenomenology; merupakan pengamatan terhadap fenomena perilaku aktor yang terjadi dalam situasi tertentu.

¹⁸ Mochtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat analisa dan Teoritism*, UGM, Yogyakarta, 1989, hal. 44-48.

¹⁹ Fred I. Greenstein, *Personality and politics: Problem of Evidence, Influence, Conceptualization*, Markham publishing Company, Chicago, 1970, hal.14

2. Dynamics; merupakan tahap balik dari perilaku seorang aktor, terutama dalam kaitannya terhadap proses pembentuk personality.
3. Genesis; analisa ini melihat bakat, kedewasaan/kematangan, dan pengalaman yang mengkulminasi dalam bentuk pengamatan yang menarik dari seorang aktor dan sekaligus analisa ini mendasari analisa dynamics.

Menyimak keterlibatan Amien Rais dalam gerakan reformasi, tidak akan terlepas dari karakter pribadinya sebagai individu. Latar belakang keluarga dan pendidikan menjadi landasan yang kuat bagi Amien Rais untuk menjadi seorang intelektual muslim kritis, bersikap konsisten dengan prinsip-prinsip moralitas politik luhur dan kombinasi antara kemampuannya.

Bisa dikatakan, Amien tumbuh dalam lingkungan keluarga yang agamis. Sang ayah adalah lulusan Mu'allimin Muhammadiyah, sedangkan ibunya pernah mendapat gelar Ibu Teladan se-Jawa Tengah, menerapkan disiplin yang amat ketat. Menurut Ny. Sudalmiyah, faktor utama yang membentuk kepribadian Amien terutama adalah melalui pendidikan agama, yaitu kebiasaan-kebiasaan positif yang terbentuk dari ajaran agama. Dari disiplin dalam keluarga inilah, Amien mulai menyadari konsekuensi dan resiko melakukan amar ma'ruf nahi munkar.

Selama belajar di Amerika, University of Chicago, Amien mendalami Islam. Dan proses intelektualisasi Amien di University of Chicago ini memungkinkan Amien berwawasan global, sadar akan urgensi demokratisasi dan bahaya politik sektarian, berpikir logis, rasional dan kritis. Amien adalah intelektual yang kaya gagasan kreatif selain artikulator gagasan yang mampu mengkomunikasikan pemikiran-pemikiran seruwet apapun menjadi 'sederhana' dan mudah dipahami, khususnya oleh rakyat.

Di era reformasi, kepiawaian mengolah dan mengartikulasikan ide adalah modal utama bagi seorang pemimpin politik. Apalagi bila potensi ini ditambah dengan kepintaran berkomunikasi dan kejelian menangkap aspirasi

rakyat. Dan potensi ini dimiliki oleh Amien Rais. Amien adalah orang pertama yang mengemukakan ide suksesi kepemimpinan nasional. Kritiknya soal kepemimpinan nasional ini dari tahun ke tahun makin mengeras.

Tidak berhenti sampai disitu, kritik dan tuntutan dilakukannya reformasi di segala bidang makin nyaring dikumandangkan, ketika sejak tahun 1997 Indonesia terpuruk dalam krisis moneter dan ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Menurut Amien Rais, reformasi adalah proses untuk menegakkan keadilan multi dimensional bagi rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Hal itu dapat dilakukan apabila kita tidak lagi mengkultuskan seseorang sebagai suatu figur atau tokoh yang sangat didewa-dewakan.²⁰ Dalam persepsi mahasiswa, reformasi tidak mungkin dapat dilaksanakan selama kepemimpinan nasional masih ada di tangan Soeharto. Bersamaan dengan itu gerakan mahasiswa turun ke jalan juga kian meningkat. Dari situ ia melihat bahwa pemerintahan rezim Soeharto telah kehilangan legitimasi rakyat. Karenanya bersama seluruh barisan pro-reformasi, ia menuntut pengunduran diri Soeharto dari jabatannya sebagai presiden, yang telah diembannya selama 32 tahun. Turunnya Soeharto dari jabatan presiden, ibarat terbukanya pintu kearah reformasi total dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan moral.

1.5. HIPOTESA

Hipotesa adalah dugaan sementara dari suatu permasalahan yang dirumuskan. Dalam memecahkan persoalan, hipotesa sangat diperlukan, seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi :

"Hipotesa adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau diterima jika ada fakta-fakta yang membenarkannya. Penerimaan dan

²⁰ A:\diskusi.yahoo.htm/http://www.washington.kbri.pro/CarakaOnline, Diskusi dengan Amien Rais di Washington, D.C.

- *penolakan hipotesa sangat bergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta yang dikumpulkan.*²¹

Sedangkan menurut Winarno Surachmad :

*“ Hipotesa adalah perumusan jawaban sementara terhadap soal yang dimaksudkan sebagai tuntutan sementara dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Hipotesa tersebut tidak perlu merupakan jawaban yang mutlak benar atau dapat dibenarkan oleh penyelidik, walaupun selalu diharapkan dapat terjadi dernikian.”*²²

Setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh Habibie dimana Soeharto yang masih mempunyai “tangan”, “telinga” dan “mata” tidak mau begitu saja menyerahkan kekeuasannya. Sebelum dia turun strategi diatur lebih dahulu. Dan diangkatlah Habibie untuk menggantikan jabatannya.

Melihat relitas diatas, Amien Rais berusaha untuk menjadikan agenda reformasi tidak keluar dari jalurnya, dimana ia mulai berusaha untuk mengembalikan agenda reformasi yang dinilai sudah banyak ditunggangi kepentingan-kepentingan, melalui isu suksesi kepemimpinan nasional sampai dengan Sidang Umum MPR, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya penulis mengajukan suatu hipotesis yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu :

Bahwa Amien Rais adalah aktor politik yang berperan penting dalam mewujudkan sebuah era baru, era reformasi. Dari sisi lain kehadiran Amien Rais dalam percaturan politik nasional seakan menegaskan fakta bahwa pemimpin informal yang tidak terakomodasi dalam struktur pemerintahan ternyata memiliki political accountability dan acceptability.

²¹ Sutrisno Hadi, Op Cit, hal. 74

²² Winarno Surachmad, Op Cit, hal. 68.

1.6. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam suatu penelitian, peran yang dominan yang bermanfaat dalam proses pengumpulan data yang memudahkan perumusan hipotesa. Metode dalam suatu penelitian berkaitan dengan seluruh langkah atau kegiatan-kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang valid terhadap masalah yang sedang diteliti.

Menurut The Liang Gie, metodologi adalah :

“ Cara atau langkah yang berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang sesuatu gejala. Pada ujung awalnya, metodologi merupakan cara untuk mengumpulkan data-data. Sedang pada ujung akhirnya merupakan cara untuk memeriksa kebenaran pernyataan yang dibuat mengenai gejala tersebut.”²³

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam pembahasan ini melakukan pengumpulan data melalui riset perpustakaan dan studi literatur, baik dari literatur-literatur ilmiah, artikel-artikel dari surat kabar dan majalah serta data-data lain yang mendukung yang merupakan metode penelitian tidak langsung. Dalam penelitian perpustakaan, penulis melakukan penelitian pada perpustakaan-perpustakaan sebagai berikut :

1. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta;
2. Perpustakaan Centre for Strategic Information Service (CSIS) di Jakarta;
3. Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
4. Perpustakaan FISIP Universitas Jember;
5. Pusat Informasi Kompas.

²³ The Liang Gie, Op Cit, hal. 103.

1.6.2. Metode Analisa Data

Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada diperlukan terlebih dahulu adanya analisa data-data yang diperoleh, untuk sampai pada kesimpulan.

Selanjutnya analisa data tersebut perlu ditunjang dengan metode berpikir yang lazim dipakai. Analisa menurut The Liang Gie, adalah :

"Segenap rangkaian perbuatan pemikiran yang menelaah sesuatu hal secara mendalam, terutama mempelajari bagian-bagian suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing bagian hubungannya satu sama lain dan peranannya dalam keseluruhan yang bulat itu".²⁴

Untuk memperoleh hasil penelitian dan analisa yang baik, penulis menggunakan cara berpikir reflektif, yaitu dengan mengkombinasi penggunaan berpikir induktif dan deduktif.

Menurut Marzuki, metode berpikir reflektif adalah:

"Proses berpikir yang dimulai dengan induktif untuk menunjukkan persoalan atau penetapan hipotesa kemudian diikuti deduktif guna meletakkan kerangka atau jalan untuk pembuktian hipotesa yang dibuat itu. Selanjutnya hipotesa perlu diuji kebenarannya dengan induksi sehingga diperoleh pemecahan yang ko- inklusif."

Pengertian deduktif dan induktif sendiri adalah sebagai berikut :

Teori deduktif :

"Apa saja yang dipandang benar pada suatu peristiwa dalam suatu atau jenis, yang berlaku sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang termasuk ke dalam kelas atau jenis itu."²⁵

Teori Induktif :

" Yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang disusun dan ditarik suatu generalisasi yang bersifat umum." ²⁶

²⁴ Ibid, hal. 106.

²⁵ Sutrinno Hadi, Op. Cit, hal. 36.

1.6.3. Pendekatan

Setiap penelitian ilmiah tidak terlepas dari masalah pendekatan sebagai usaha untuk mempertajam analisa yang membuat penelitian akan lebih spesifik, karena dengan pendekatan ini semakin jelas dari mana sudut pandang suatu permasalahan.

Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah :

*"Keseluruhan rangkaian sikap penyelidikan, sudut pandang, ukuran, pangkat duga, dan kerangka dasar pemikiran dari suatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu. Jadi, pendekatan merupakan keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan sesuatu sasaran, memasuki suatu bidang ilmu dan memahami suatu pengetahuan yang teratur, bulat mengenai sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut."*²⁷

Dalam penulisan ini, penulisan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan tingkah laku (*Behaviour Approach*) dan pendekatan sejarah.

Pendekatan sejarah dimaksudkan untuk mengetahui suatu proses peristiwa masa lalu dan hubungannya dengan masa kini. Dengan pendekatan sejarah ini ingin diketahui latar belakang Amien Rais bagi pembentukan pribadinya sehingga terlibat dalam gerakan reformasi.

Sedangkan pendekatan tingkah laku (*Behaviour Approach*) menurut J.C. Plano adalah :

*"Suatu pendekatan yang memusatkan pada tingkah laku individu dan kelompok yang aktual ketimbang pada peranan politik formal / fungsi-fungsi lembaga dan struktur."*²⁸

Pendekatan tingkah laku digunakan untuk melihat sikap dan usaha yang dilakukan Amien Rais atas keterlibatannya dalam gerakan reformasi di Indonesia.

²⁶ Ibid, hal. 42.

²⁷ The Liang Gie, Op. Cit, hal. 80.

²⁸ J.C. Plano, Op. Cit, hal, 16-20.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG AMIEN RAIS

2.1 Latar Belakang Amien Rais

Amien Rais lahir di Solo, 24 April 1944, dari sebuah keluarga yang sangat taat dalam menjalankan agamanya. Suhud Rais, ayahnya, adalah lulusan Muallimin Muhammadiyah dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai kantor Departemen Agama. Sudalmiyah, ibunya, adalah alumni Hogere Inlandsche Kweekshool (HIK) Muhammadiyah, kemudian menjadi aktivis Aisyiyah¹ dan pernah menjabat sebagai ketua di Surakarta selama dua puluh tahun. Sudalmiyah juga dikenal sebagai seorang guru yang ulet. Ia mengajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) Negeri dan Sekolah Bidan Aisyiyah Surakarta. Karena prestasinya di dunia pendidikan, pada tahun 1985, Sudalmiyah mendapat gelar Ibu Teladan se-Jawa Tengah. Kecenderungan aktivisme kedua orangtuanya menentukan bagaimana anak-anaknya, termasuk Amien harus disosialisasikan dengan nilai-nilai moralitas Islam dan menempuh pendidikan formal maupun informal sejak kanak-kanak hingga dewasa.

Amien adalah anak kedua dari enam bersaudara. Amien tumbuh dan dibesarkan dalam suatu komunitas semiurban, kampung Kepatihan Kulon, Solo, Jawa Tengah. Secara sosiobudaya, komunitas demikian amat mementingkan rasionalitas, hubungan-hubungan impersonal, berorientasi pada prestasi, meritokrasi. Meskipun di sisi lain unsur-unsur gemeinschaft-nya seperti nilai egalitarian, solidaritas kelompok, kolektivitas dan perkauman

¹ Aisyiyah adalah organisasi wanita Muhammadiyah yang bergerak di kalangan ibu-ibu. Organisasi ini dipimpin pertama kali oleh istri pendiri Muhammadiyah sendiri, yaitu Nyai Achmad Dahlan.

masih relatif kukuh. Dengan kata lain Solo adalah sosok masyarakat "tradisional" dari bentuk *gemeinschaft* ke bentuk *gessellschaft*.²

Diakui Amien, ketika masih kanak-kanak ia lebih banyak dididik oleh ibunya karena ayahnya sibuk berdagang dan menjadi pendidik. Hajah Sudalmiyah, meminjam David Apter, adalah model "identifikasi diri" (*identification model*) bagi Amien. "Ibu saya amat menekankan disiplin dan rasional", kata Abdul Razak, kakak kandung Amien. Wanita itu sangat keras dalam mendidik anak-anaknya terutama dalam pendidikan agama. Kadang karena meninggalkan shalat, Amien dihukum ibunya dengan dimasukkan ke ruang terkunci. Ibunya terobsesi menjadikan Amien, anak keduanya, sebagai seorang kiai, ustad atau ulama terkemuka. Disiplin pendidikan agama formal terstruktur dan informal relatif ketat itulah yang membentuk karakter Amien menjadi seorang muslim puritan sejak usia dini.

Amien dididik bahwa apapun yang dilakukan dalam hidup tidak lain adalah bentuk pengabdian kepada Allah (*ibadah*). Tidak ada satupun perbuatan sia-sia dalam hidup karena semuanya bernilai keilahian dan berimplikasi keagamaan. Amien selalu diingatkan agar berpegang teguh pada tiga prinsip hidup: kejujuran, kesederhanaan, dan mencintai sesama makhluk. Dan, sebagaimana diakui Amien, etika universal Islam ini yang dijadikan pegangan hidupnya selama ini.³

² Menurut Ferdinand Tonnies, *Gemeinschaft* (*Paguyuban*) adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis. *Paguyuban* akan dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kerabat, rukun tetangga, dan sebagainya. Sedangkan *Gesellschaft* (*Patembayan*) merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk yang dalam pikiran belaka (*imaginary*) serta strukturnya bersifat mekanis. Bentuk *Gesellschaft* terutama terdapat didalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik, misalnya ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri dan lain-lain. Lihat dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 144.

³ Tim LIP FISIP UI, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru: Reformasi Undang-Undang Partai Politik*, Mizan Pustaka, 1998, hal. 172-173

Sejak kecil amien sudah dilatih disiplin oleh ibunya. Bila Amien kecil melanggar, ibunya tidak segan-segan menghukumnya. Amien harus bangun pukul 04.00 setiap pagi, dengan meletakkan jam weker di dekat tempat tidur. Dan ketika bangun mereka diminta untuk mengucapkan "*ashalatu khairun minan naum*"⁴ dengan suara keras sehingga terdengar oleh ibunya. Sang ibu biasanya memberikan imbalan berupa uang 50 sen. Uang tersebut kemudian mereka tabung untuk membeli baju baru menjelang lebaran.

Walaupun tegas tetapi ibunya tidak pernah memaksakan kehendak. Anak-anaknya dibiarkan tumbuh secara alami, sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Hanya saja, pesan sang ibu yang tak pernah putus adalah selalu mengingatkan bahwa hakikat hidup adalah ibadah.

Dalam berbagai kesempatan Amien Rais secara terus terang mengakui bahwa ibunyalah yang sangat mempengaruhi karakternya yang lugas tanpa basa-basi. Sampai kini Amien masih menempatkan ibunya sebagai konsultannya dan tempat pelipur lara. Ketika ia menghadapi situasi yang sulit, ia selalu pulang ke Solo menemui sang ibu untuk meminta pendapatnya. Menurut Amien, walaupun ibunya kini berusia 80-an, tetapi ketegasan dan kejernihan berpikirnya masih seperti dulu.

Prinsip hidup yang jadi pegangannya diakuinya sangat sederhana, yaitu mencari ridha dan ampunan Allah. Untuk mencapainya orang harus berbicara dan berbuat apa adanya. "*You are what you are*", katanya lebih lanjut. Ia membagi kebahagiaan menjadi tiga jenis, yaitu kebahagiaan spiritual, kebahagiaan intelektual dan kebahagiaan psikologis. Kebahagiaan spiritual diperoleh dengan cara menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Kebahagiaan intelektual diperoleh dengan cara memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat. Sedangkan kebahagiaan psikologis didapatnya bila ia bisa berbuat atau menolong orang lain.

⁴ Kalimat dalam bahasa Arab ini merupakan bagian dari seruan adzan untuk shalat subuh. Maknanya, "lebih baik menegakkan shalat daripada tidur".

Amien Rais menikah pada 9 Februari 1969, dengan seorang gadis yang sudah dikenalnya sejak mereka masih sama-sama kanak-kanak, Kusnariyati Sri Rahayu. Kini mereka sudah dikaruniai lima orang anak, tiga putra dan dua putri.

Kusnariyati adalah ibu rumah tangga biasa. Untuk mengisi kesibukannya ia mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) di sebelah rumahnya. Karena ketekunannya, TK ini kemudian menjadi besar dan terkenal. Dimata Amien Rais, ia adalah wanita yang luar biasa. Keberanian dan ketegaran yang dimiliki Amien Rais ternyata tidak lepas dari peran sang istri. Ketika ia merasa putus asa, istrinya lah yang terus-menerus mendorong semangatnya. Begitu pula ketika ia merasa lelah melawan Orde Baru, istrinya tidak pernah lelah untuk membangunkan kembali spiritnya. Sampai-sampai ia pernah mengomentari istrinya sebagai sumber inspirasi dan motivasinya. Bahkan menjelang tumbanganya Soeharto, sempat tersebar isu bahwa Amien Rais akan ditangkap. Ia kemudian memberitahu sang istri tentang berita buruk yang akan menimpanya. Dengan nada tegar sang istri menjawab, "Insyah Allah ini akan mempercepat kejatuhan Rezim Soeharto".⁵

2.1.2 Pendidikan Amien Rais

Spirit Muhammadiyah tampaknya sudah dikenal Amien Rais sejak kecil. Disamping dari lingkungan keluarga, jenjang pendidikannyapun dilalui di perguruan Muhammadiyah, sejak Taman Kanak-Kanak hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Karenanya, iapun aktif di organisasi-organisasi kepemudaan Muhammadiyah, termasuk kepanduan *Hizbul Wathon*. Rupanya hasrat belajar Amien sangat tinggi. Ini terlihat dari rangkap sekolah yang dilakukannya. Ketika ia tengah menempuh jenjang SMP-nya, Amien juga mengikuti pendidikan pesantren, yakni di pesantren Mamba'ul Ulum

⁵ Muhammad Najib, *Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*, Serambi Ilmu Semesta, 1999, hal.51-56.

(sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri/MAN) dan pesantren Al-Islam, Solo. Disamping itu Amien Rais mulai belajar Islam secara intensif dengan Kiai Anwar Sodik di Kampung Kauman.

Setamat SMA, orang tua Amien sebenarnya berharap agar ia melanjutkan studi di perguruan tinggi agama, misalnya di Al-Azhar, Mesir. Hal ini karena sang ibu menginginkannya menjadi seorang kyai (ahli agama). Namun ia lebih memilih jurusan Hubungan Internasional di FISIP UGM, Yogyakarta. Meski demikian, untuk “menampung aspirasi” orang tuanya, Amien juga merangkap kuliah di fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Namun pendidikan di IAIN terpaksa tidak diselesaikannya, lantaran ada keputusan pemerintah saat itu yang melarang mahasiswa berkuliah ganda⁶. Sewaktu menjadi mahasiswa di UGM, Amien Rais aktif dalam organisasi ekstra. Amien Rais diantaranya aktif dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).⁷ Di IMM, Amien Rais bahkan termasuk dalam *assaabiquna al-awwalun*, bersama dengan Muhammad Jasman al-Kindi, Marzuki Usman, Soedibyo Markoes, Yahya Muhaimin, dan M. Rasyad Saleh.⁸ Dimasa ini, Amien dikenal sebagai aktivis Muhammadiyah yang bersemangat. Dalam pergulatan aktivisme Muhammadiyah itu Amien seakan menemukan keharusan memperteguh semangat kolektivitas ketika harus berhadapan dengan gencarnya proses modernisasi sementara akar-akar kulturalnya masih terikat pada struktur nilai pedesaan. Sebagai konsekuensinya, menurut Fachry, meski secara fisik Amien terlahir di Kawasan Kota, kegiatannya di Muhammadiyah tetap mensosialisasikan dia

⁶ Sidarta Gautama dan Aris Boediono, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih Menurut 4 Tokoh Reformasi: Amien Rais, Emil Salim, Nurcholis Madjid, Yusril Ihza Mahendra*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal.3-5.

⁷ Di IMM Amien Rais diantaranya pernah menjabat ketua III, periode I (1965-1967), hasil perubahan kepemimpinan. Pada periode II (1967-1969), selain duduk sebagai ketua II, juga duduk sebagai biro politik bersama dengan Yahya Muhaimin. Periode III (1969-1971), selain menjabat ketua III, juga duduk sebagai biro politik.

⁸ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 134.

mensosialisasikan dia dalam tradisi budaya perkauman. Dari sinilah bisa kita pahami latar sosiokultural komitmen perjuangan Amien untuk umat Islam dan kecenderungannya pada “sektarianisme” pada awal dirinya menapaki karier sebagai aktivis politik.

Pada tahun 1968, Amien memperoleh beasiswa untuk studi pasca sarjana (M.A) di University of Notre Dame, Amerika Serikat. Dia berhasil memperoleh gelar M.A pada tahun 1972. Tak lama setelah itu, tahun 1975 Amien kembali berangkat ke negeri Paman Sam untuk mengambil gelar Doktor di University of Chicago. Disertasi dokturnya tentang gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir diselesaikan pada 1981. Dalam proses penyelesaian disertasinya itu, Amien sempat belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. “Impian” ibunya menyekolahkan Amien di Al-Azhar menjadi kenyataan, meskipun tentu tidak persis seperti yang diimpikannya. Amien memanfaatkan saat belajar di Universitas tertua di dunia untuk melakukan kontak intelektual dengan para aktivis gerakan Ikhwan Muslimin dan mendalami pemikiran tokoh-tokohnya seperti Sayyid Quthb. Proses intelektualisasi fase Al-Azhar ini relatif berdampak pada corak gagasan keagamaan dan politik Amien di kemudian hari.

Selama belajar di Amerika, Amien seakan menapaki jalan studi yang ditempuh oleh tokoh yang dikaguminya, Ali Syariati. Di Universitas of Chicago yang dikenal sebagai “sarang” kaum orientalis, sebagaimana Universitas Sorbonne, tempat Syari’ati belajar, Amien mendalami Islam. Islam yang dipelajarinya tentu tidak lepas dari bias orientalisme dan westernisme. Interaksi intelektual intensif Amien dengan Prof. Leonard Binder, keturunan Yahudi, terjadi pada masa ini. Sebagaimana Syari’ati berhasil mendalami pemikiran barat tetapi kemudian tetap muncul menjadi intelektual Muslim sejati, setelah lulus dari University of Chicago Amien menampakkan fenomena yang sama seperti Syari’ati. Dia menjadi intelektual mujahid yang pikirannya penuh dengan gagasan-gagasan perjuangan Islam. Amien

menunjukkan kepribadiannya sebagai sosok intelektual Muslim kritis terhadap orientalis (barat), berani, dan dalam segi tertentu, meski tidak begitu tepat, "puritan".

Sebagaimana Nurcholis Majid, Jalaluddin Rakhmat, 'Imaduddin 'Abdulrahim, dan cendekiawan Muslim lainnya yang berpendidikan Barat, proses intelektualisasi Amien di University of Chicago ini memungkinkan Amien berwawasan global, sadar akan urgensi demokratisasi dan bahaya politik sektarian, berpikir logis, rasional dan kritis. Yang tak kalah pentingnya semakin meneguhkan keyakinan dirinya bahwa Islam adalah agama terbaik bagi umat manusia. Fase University of Chicago adalah fase pencerahan spiritual intelektual terpenting dalam hidup Amien.

Beberapa figur berpengaruh terhadap formasi karakter Amien antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah 1912), Mohammad Natsir (tokoh Masyumi dan mantan perdana menteri 1950-1951) Abul A'la Al-Maududi (pemikir Islam terkemuka dan pendiri Jama'at-i Islami Pakistan), dan Ali Syari'ati ("arsitek revolusi Iran, 1976-1977). Dari Ahmad Dahlan, Amien belajar pola, metode, paham modernisme dan strategi perjuangan Muhammadiyah melakukan purifikasi Islam. Pengaruh tokoh itu tampak dalam kutipan ucapan Ahmad Dahlan dalam banyak tulisan Amien di berbagai media massa dan ceramah-ceramahnya selama ini.

Natsir adalah tokoh Islam yang sangat dikagumi Amien. Dari tokoh Masyumi itu, Amien berkaca diri dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar (menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran), menghindari cara-cara kekerasan, bersikap sebagai demokrat tulus, dan teguh memegang etika politik luhur. Dalam diri Natsirlah seakan Amien menemukan figur ideal yang mampu mengombinasikan aktivisme dan intelektualisme sekaligus, tanpa mengalami keretakan kepribadian (split personality). Kuatnya pengaruh Natsir itu menyebabkan Nurcholis Majid menyebutnya sebagai seorang yang sangat Natsiris.

Maududi berpengaruh pada Amien dalam mempersepsikan hakikat hubungan Islam dengan negara. Amien, seperti Maududi menolak keras gagasan negara sekular apapun bentuknya dan mengecam Marxsisme dan kapitalisme sebagai ideologi sekular yang gagal di dunia Islam serta tidak mempunyai masa depan. Pandangan Amien bahwa Islam tidak mungkin bersintesis dengan sekularisme, paham yang memisahkan agama dari negara, mengalami afirmasi intelektual setelah Amien berkenalan dengan karya-karya pemikir Islam Pakistan ini. mungkin, ini masih sangat hipotesis, watak "fundamentalisme" Amien di masa lalu tak terpisahkan dari pengaruh-pengaruh gagasan Maududi. Dalam hal ini, Amien tidak sendiri karena banyak tokoh politik Islam Indonesia sejak 1950-an (tercermin dari gagasan mereka di perdebatan Dewan Konstituante) hingga sekarang yang kuat dipengaruhi oleh karya-karya intelektual Maududi.

Ali Syari'ati (1933-1977) dikagumi Amien karena gagasan-gagasan dialektisnya yang dinamis, radikal, revolusioner, dan anti *status quo*. Dalam kata pengantar untuk karya Ali Syari'ati (yang diterjemahkannya) terlihat kekaguman Amien terhadap "arsitek" revolusi Iran itu. Dalam diri Ali Syari'atilah tampaknya Amien menemukan sosok intelektual mujahid yang hanya bermakna hidupnya bila selalu menyuarakan kebenaran, keadilan, menerangi, dan selalu berada diantara massa, serta bersama massa melakukan perubahan sejarah.⁹

2.3 Persepsi Masyarakat terhadap Amien Rais

Di era reformasi ini, pribadi yang lurus, pandai dan kepiawaian mengolah serta mengartikulasikan ide adalah modal utama bagi seorang pemimpin politik. Apalagi, bila potensi itu ditambah kepintaran berkomunikasi dan kejelian menangkap aspirasi pendukungnya. Banyak kalangan muda

⁹Usulan Tim LIP FISIP UI, Op. Cit, hal. 172-176

yang mengidolakannya. Disaat tokoh-tokoh politik lain berbicara dengan kerangka eufemisme dan penuh kepalsuan, Amien justru bicara fakta yang sebenarnya.

Sebagai politisi baru, tampaknya Amien paham benar, banyak orang telah muak terhadap rezim Orde Baru. Tapi karena tidak berani atau kendala media komunikasi, mereka hanya bisa diam. Karena itu ketika Amien melontarkan segala fakta yang tak pernah mencuat ke permukaan, ia langsung dianggap berani dan dikagumi orang.

Padahal, tidak mudah menjadi Amien Rais. Ia berusaha memberikan pendidikan politik, 'untuk memecahkan kebekuan politik', katanya suatu ketika dengan bersedia diajukan sebagai calon Presiden Indonesia di tengah arus formal pencalonan kembali Suharto menjelang SU MPR 1998. Namun pada saat yang sama ia ikhlas dan randah hati terang-terangan mengakui bahwa BJ. Habibie adalah calon Wakil Presiden yang kredibel, kapabel, dan banyak didukung. Padahal BJ Habibie ada dalam satu paket dengan Soeharto.¹⁰

Menjadi Amien memang tidak mudah. Biasanya, kita dengan bersemangat mengkritik dan mencerca sesuatu yang tidak kita suka dan setuju, sembari mengumpulkan energi perlawanan sebanyak-banyaknya, sehingga tidak ada sisa ruang bagi pemakluman dan apresiasi untuk hal-hal baik dari sesuatu itu. Biasanya, kita mendukung, menyokong, mengagungkan sesuatu yang kita suka dan setuju, sambil mengumpulkan energi kepemihakan sebanyak-banyaknya sehingga tidak ada sisa ruang bagi kritisisme dan koreksi untuk sesuatu itu.

Ketika kebanyakan kita terbiasa 'membongkar' tanpa merasa berkewajiban 'memasang kembali', menjadi Amien memang terasa susah. Ketika umumnya kita terbiasa menjadi oposan atau menyokong habis-habisan, sesungguhnya sulit mengikuti logika kerja Amien. Mengancam

¹⁰ Muhammad Najb, *Amien Rais Sang Demokrat*, Gema Insani Press, Jakarta, 1998, hal.154.

sembari membantu; mencalonkan diri sambil mengakui kandidat dari kelompok lain; mengkritik sangat keras sambil bersedia berdialog mengenai substansi kritiknya; adalah hal-hal yang terlihat absurd bagi banyak orang.

Bahkan sekedar memahaminya, tetapi sulit pada sebagian orang. Ini terbukti dengan terpecahnya publik kedalam tiga kelompok penyingkapan: *pertama*, merupakan suatu kelompok orang yang sekedar kebingungan menghadapi logika kerja politik Amien. Mereka benar-benar tidak habis mengerti. Kelompok ini masih mungkin menjadi pendukung Amien dengan dua cara: mencari daya ikat lain diluar persetujuan pada logika kerja politik Amien (misalnya, kesamaan primordial semacam agama); atau mengikhhlaskan diri untuk merendah hati mengakui belum sampai pada maqam untuk bisa memahami Amien secara rasional.

Kedua, merupakan kelompok orang yang menyimpulkan bahwa Amien plin-plan dan tidak konsisten. Kelompok ini memandang sikap "mengancam sambil membantu" atau "mencalonkan diri sambil mengakui kehebatan calon lain" atau "mengkritik sambil tetap berdialog", sebagai semacam *oxymoron*: dua hal yang mustahil disatukan. Bagi mereka pasangan "mengancam" adalah "merecoki", pasangan "mencalonkan diri" adalah "menjelek-jelekkkan seteru", pasangan "mengkritik" adalah "menutupi dialog". Setelah menyaksikan gaya politik Amien, kelompok ini akan menjauhi Amien dan mencari figur lain yang dianggap lebih "konsisten".

Ketiga, merupakan kelompok orang yang justru melihat logika kerja Amien senagai gaya seorang demokrat. Sikap Amien yang mengancam sambil membantu, mencalonkan diri sambil mengakui kredibilitas lawan, dan mengkritik keras sambil tetap menyediakan ruang bagi dialog, adalah sikap yang justru dewasa dan layak ditiru. Kelompok ini akan menyemati Amien dengan penghargaan tinggi dan bersikukuh menjadi pendukung setia.¹¹

¹¹ Ibid, hal. 155-156.

Dalam kompleksitas pengalaman dan pergaulannya, Amien Rais telah mendapat kerangka dukungan luas dari masyarakat. Sebagai ilmuwan kritis, pembaca dan pendengarnya berasal dari segala lapisan dan golongan masyarakat. Perjalanannya ke seluruh daerah sebagai pemimpin Muhammadiyah dan penceramah, menjadikannya tokoh yang dikenal dan didukung di berbagai daerah. Aktivasinya di dalam LSM dan kalangan masyarakat prodemokrasi, menyebabkannya dikenal dan didukung oleh kaum pembaharu menuju demokratisasi. Sekalipun besarnya pendukungnya di setiap segmen masyarakat pengagumnya mungkin masih relatif kecil, kompleksitas pemikiran dan kegiatannya telah membuahkan suatu dukungan yang beraneka warna di seluruh Indonesia.¹²

Bagi pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang terbiasa akomodatif terhadap kekuasaan, suara dan sikap kritis Amien Rais barangkali terasa mengganggu. Akan tetapi, seyogyanya disadari bahwa kedewasaan dan perolehan legitimasi politik elite dari massa sesungguhnya sangat ditentukan oleh kemampuan elite politik untuk menyingkapi kritik secara responsive daripada ditentukan oleh kemampuan rezim untuk melakukan dominasi atau koersi.

Tokoh-tokoh vokal seperti Amien Rais pada dasarnya adalah wakil yang representatif dari kepentingan massa untuk ikut berpartisipasi sebagai kekuatan kontrol sosial. Menempatkan tokoh vokal seperti Amien Rais di jajaran belakang dalam panggung politik untuk sementara mungkin dapat meredam suara-suara kritis. Tetapi secara politis tidak mustahil kebijakan semacam ini akan berdampak kontra produktif bagi proses pembangunan politik di Indonesia.

Dengan memberi kesempatan tokoh-tokoh dan kelompok intelektual bermain dalam sistem, dan menempatkan mereka sebagai mitra tanding

¹² Arbi Sanit, *Fenomena Politik Pengkaderan*, Majalah Ummat, No. 25 Tahun.III, 5 Januari 1996/6 Ramadhan 1418, hal. 43.

yang sekali dua kali boleh untuk melemparkan pukulan kritis, akan makin memperkokoh dan fungsional dalam melatih kedewasaan pemerintah dalam berpolitik.

Sebaliknya, memperlakukan mitra tanding tidak berdaya dan tidak mampu bersikap kritis, sesungguhnya hanya akan melahirkan pemerintahan yang rapuh karena legitimasi yang dibangun semata atas dasar koersif bukan atas dasar komitmen yang benar-benar tulus dari rakyat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan manuver Amien Rais mendapat simpati luas dari masyarakat. *Pertama*, semakin merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat begitu berharap adanya perubahan, ditandai makin maraknya kelompok-kelompok masyarakat yang datang ke Komnas HAM, DPR, unjuk rasa, dan lain-lain. Merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat dipicu oleh derasnya teknologi informasi dan telekomunikasi.

Kedua, kemunculan Amien Rais di tengah situasi makin merosotnya kualitas organisasi sosial politik dibandingkan dengan perkembangan masyarakat. Organisasi sosial politik masih menjadi subordinasi negara, tidak mandiri, mandul, sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan pemberdayaan dan pendewasaan politik kepada masyarakat.

Ketiga, Amien Rais muncul ditengah keragu-raguan masyarakat terhadap tokoh prodemokrasi lain, yaitu Mega dan Gus Dur. Mega memang telah mengambil langkah yang berani, namun Mega tidak berani secara tegas mencalonkan diri sebagai presiden.

Keempat, Amien Rais tampil ditengah makin merosotnya kualitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kualitas kehidupan sosial diwarnai makin maraknya penyakit-penyakit sosial semacam korupsi, kolusi, nepotisme, koncoisme, bapakisme, dan lain-lain. Sementara keroposnya sistem politik, antara lain ditandai oleh tidak aspiratifnya dan tidak arifnya negara dalam menyikapi kelompok kritis. Kalangan yang mencoba berbeda

pendapat dengan suprastruktur tidak akan mendapat tempat di mata negara. *Kelima*, Amien Rais muncul ditengah kerinduan masyarakat yang luar biasa munculnya tokoh alternatif.¹³

Kritik yang dilontarkan Amien Rais dirasakan banyak pihak terlalu keras, untuk itu menurut Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif agar Amien Rais pada masa yang akan datang bila mau melakukan kritik harus dalam konteks yang lebih santun. Tajam, mengena, tetapi musuh tidak merasa sakit hati. Hal ini lebih efektif, kecuali jika musuh sudah sulit untuk dikritik, maka perlu teknik kritik yang lebih keras lagi.¹⁴ Dengan gayanya yang terlalu lugas dan jelas tentang suatu hal banyak pihak yang merasa tersinggung oleh Amien Rais. Jadi, memang Amien Rais harus sadar bahwa gaya dia bisa terasa tidak nyaman terhadap banyak orang, terutama pada kalangan Soeharto.

Dr. Affan Gafar mengharapkan agar Amien Rais tidak terbebani oleh persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini karena semuanya diangkat oleh Amien Rais. Amien Rais juga seharusnya bisa membatasi diri untuk hal itu, misalnya Amien Rais berbicara soal ekonomi yang bukan bidangnya, tetapi akan lebih cocok jika ia berbicara mengenai umat, politik, dan persoalan-persoalan kenegaraan.¹⁵

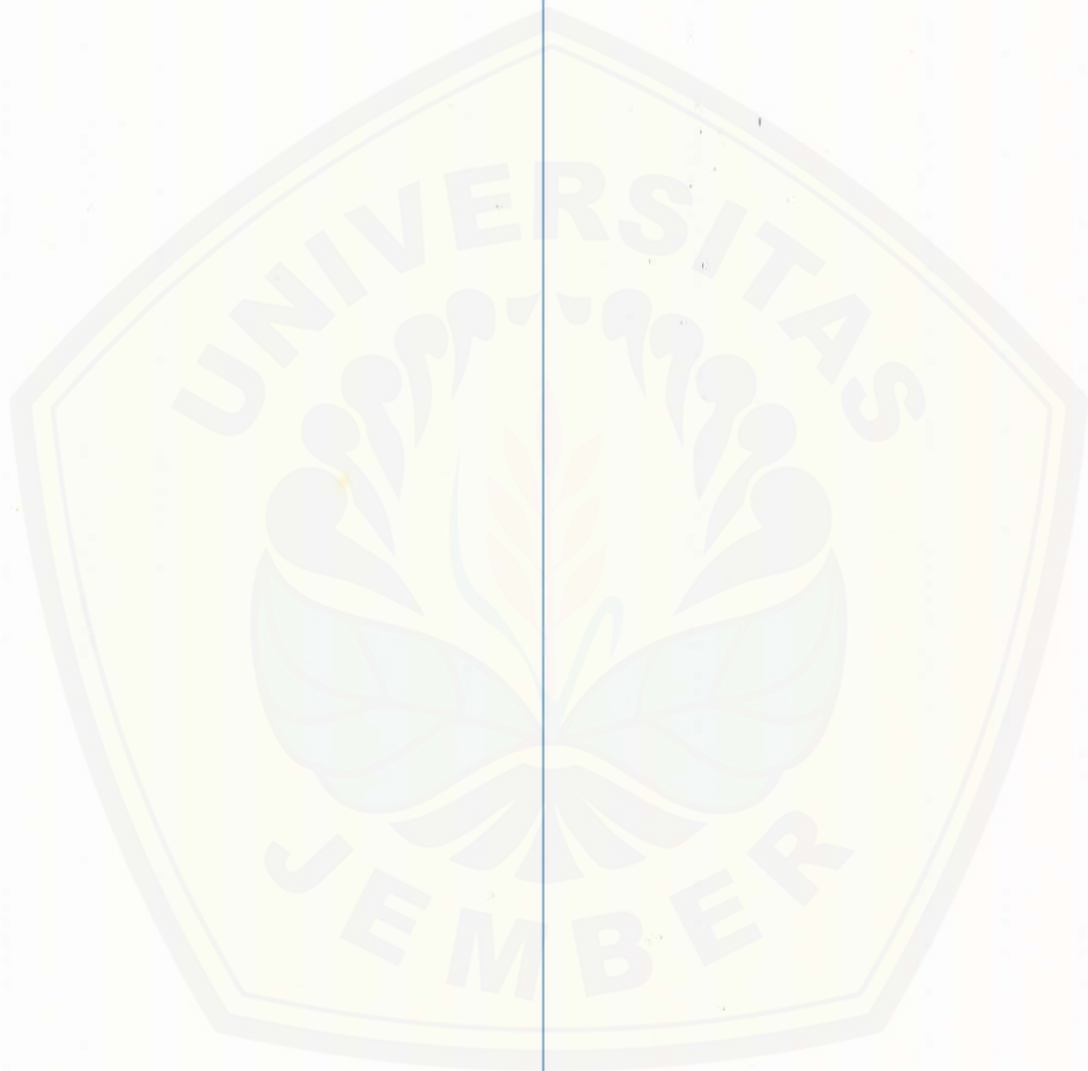
Dalam kompleksitas pengalaman dan pergaulannya, Amien Rais telah mendapat kerangka dukungan luas dari masyarakat. Sekalipun besaran pendukungnya dari di setiap segmen masyarakat pengagumnya mungkin masih relatif kecil, namun kompleksitas pemikiran dan kegiatannya telah membuahkan suatu dukungan yang beraneka warna di seluruh Indonesia. Kelemahannya, mungkin masih kurang intensifnya ia berkomunikasi dengan kalangan petani, buruh, dan Islam pedesaan. Tetapi perjalanan waktu tetap

¹³ Marzuki Wahid, *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 1999, hal. 289-290.

¹⁴ Muhammad Najib, *Amien Rais sang Demokrat*, Op. Cit, hal. 183.

¹⁵ *Ibid*, hal.194.

akan membawanya ke arah itu. Sebab, kiprah kepemimpinannya semakin lama semakin meluas ke segenap segmen masyarakat.¹⁶



¹⁶ Arbi Sanit, Op. Cit, hal. 43.

BAB III PEMIKIRAN POLITIK AMIEN RAIS

Sejak kembali dari Amerika, mungkin karena melihat berbagai problema sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia, Amien memperkenalkan istilah-istilah baru dalam ilmu sosial sebagai respon. Bila dicermati secara teliti, substansi pemikiran Amien tidaklah sepenuhnya baru. Ia menggali pesan-pesan moral Al-Qur'an, kemudian mengemasnya dengan ilmu sosial politik yang dimilikinya. Menurut Sukidi, secara teoritis historis, bahasa agama Amien Rais berpijak pada paradigma bahasa yang diimplementasikan secara konprehensif: berdimensi sosial, ekonomi, dan politik.¹ Dimensi politik adalah bagian yang paling menonjol. Ini bisa dipahami karena kondisi politik, terutama kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa di Indonesia, dalam pandangan Amien sangat bertolak belakang dengan moralitas agama yang ia pahami.

3.1 Tauhid Sosial

Sebagai cendekiawan Muslim modernis, karakteristik pemikiran Amien Rais lebih banyak dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap tauhid. Tauhid berasal dari kata *wahhada*, *yuwahhidu*, *tauhidan*, yang berarti mengesakan Allah. Dari sisi istilah, tauhid berarti meniadakan (mengeksklusikan) sifat ketuhanan dari seluruh sifat alam. Segala ciptaan Allah adalah makhluk yang bersifat tidak transenden dan tunduk pada hukum, ruang dan waktu. Serta bagaimanapun tidak ada sesuatu apapun yang dapat berwujud Tuhan ataupun seperti Tuhan. Tuhan (Allah) sepenuhnya bukanlah ciptaan atau

¹ Sukidi, "Bahasa Agama Amien Rais", *Republika*, 1 Agustus 1998.

alam. Karena itu Allah bersifat transenden. Ia satu-satunya dzat yang transenden, yang mengatasi semua yang ada di alam semesta.

Istilah "tauhid sosial" merupakan istilah baru yang diperkenalkannya dalam wacana ilmu-ilmu sosial. Tauhid sosial dimaksudkan sebagai dimensi sosial dari pengakuan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul-Nya. Sebagai muslim tidaklah cukup kalimat tauhid tersebut hanya dinyatakan dalam bentuk ucapan (lisan) dan diyakini dalam hati, tetapi harus dilanjutkan dalam bentuk perbuatan. Sebagai konsekwensi pemikiran ini, berarti semua ibadah murni (mahdhah) seperti shalat, puasa, haji, dan seterusnya memiliki dimensi sosial. Kualitas ibadah seseorang sangat tergantung pada sejauh mana ibadah tersebut mempengaruhi perilaku sosialnya.²

Menurut Amien Rais, tauhid sesungguhnya menurunkan atau mengisyaratkan adanya lima pengertian. *Pertama, unity of Godhead*, yaitu kesatuan ketuhanan. *Kedua, unity of creation*, yaitu kesatuan penciptaan. Seluruh makhluk di alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak, yang lahir maupun yang gaib, merupakan bagian dari ciptaan Allah. *Ketiga, unity of mankind*, yaitu kesatuan kemanusiaan. Jadi, perbedaan warna kulit, bahasa, geografi, sejarah, dan segala perbedaan yang melatarbelakangi keragaman umat manusia tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi. *Keempat, unity of guidance*, yaitu kesatuan pedoman hidup. Bagi orang yang beriman hanya ada satu pedoman hidup, yakni yang datangnya dari Allah yang berupa wahyu. Karena Allah yang menciptakan manusia, maka Allah pula yang paling tahu mana yang baik atau buruk bagi manusia, sehingga kita betul-betul dapat mencapai kebahagiaan didunia maupun di akhirat. *Kelima, unity of the purpose of life*, yaitu kesatuan tujuan

² Muhammad najib, *Melawan Arus-Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*, PT Serambi Ilmu Semesta, 1999, hal. 60-61.

hidup. Bagi orang yang beriman, satu-satunya tujuan hidup adalah untuk mencapai ridha Allah.³

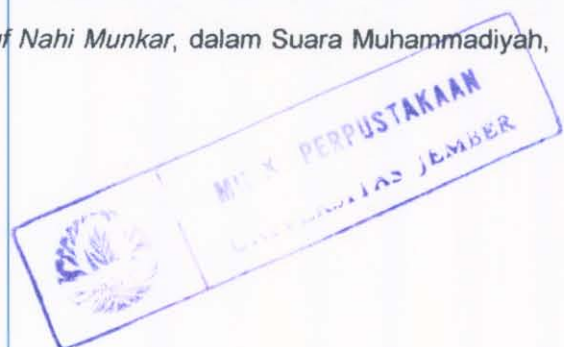
Konsekuensi dari pengertian tauhid ini, maka yang ada di muka bumi ini hanyalah satu “kesatuan kemanusiaan” yang tidak dapat dibatasi oleh suku, ras, bangsa atau negara. Semua manusia merupakan satu kesatuan yang diciptakan oleh “kesatuan pencipta”.⁴ Tauhid dapat berarti pula sebagai pembebasan, yaitu pembebasan manusia dari perbudakan mental dan penyembahan sesama makhluk. Hasilnya adalah “manusia tauhid” atau “umat tauhid”, yang mempunyai tugas untuk menegakkan suatu orde sosial yang adil dan etis.⁵ Dari sini jelas bahwa seluruh aspek kehidupan sosial Islam harus diintegrasikan ke dalam jaringan rasional Islam, yang menyangkut aspek-aspek keagamaan dan keduniawian, spiritual dan material, sosial dan individual. Dan jaringan rasional Islam ini akan diuji melalui ibadah yang meliputi lima pilar kewajiban Islam, syahadat, shalat, shaum, zakat, dan haji.

Pemahaman tauhid seperti ini oleh Amien Rais dipopulerkan dengan istilah tauhid sosial. Munculnya konsep tauhid sosial ini tampaknya lebih dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai problematika umat yang menurut Amien Rais telah mulai meninggalkan ajaran tauhid, khususnya tauhid sosial. Seperti disebutkan diatas, makna tauhid adalah pengesaan akan keberadaan Allah, maka makna tauhid sosial adalah dimensi sosial dari tauhid itu sendiri, yang tidak lagi mengenal diskriminasi manusia atas dasar pertimbangan etnis, suku, agama, adat istiadat, bahasa dan termasuk agama.

Konsep tauhid sosial merupakan imbas dari pergulatan Amien Rais yang cukup panjang dalam upaya membongkar kejumudan masyarakat,

³ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Mizan Pustaka, Bandung, 1998, hal. 109.

⁴ M. Amien Rais, *Tauhid ke Arah Amar Makruf Nahi Munkar*, dalam Suara Muhammadiyah, Nomor 08/77/1992.



terlebih dalam bidang sosial di lingkungan umat Islam. Selama ini Amien Rais memandang bahwa umat Islam lebih sensitive pada tindakan-tindakan yang berbau a-moral di satu sisi, sementara di sisi lainnya, mereka kurang mempunyai kepekaan sosial terhadap sesama, apakah itu terhadap penindasan, kesenjangan ekonomi, dan bentuk-bentuk ketidak-adilan lainnya. Padahal persoalannya juga tidak kalah serius dengan masalah a-moral. Namun Amien Rais juga menyadari bahwa untuk merealisasikan gagasan tauhid sosial akan menghadapi banyak kendala, dan untuk memecahkannya tidak cukup satu atau dua hari, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan niatan yang sungguh-sungguh.

Amien Rais mengingatkan bahwa tauhid menuntut ditegakkannya keadilan sosial karena dilihat dari kaca mata tauhid, setiap gejala eksploitasi manusia atas manusia lainnya merupakan pengingkaran terhadap persamaan derajat disisi Allah. Dengan demikian jarang yang menganga lebar antara lapisan kaya dan miskin yang selalu diikuti dengan kehidupan yang eksploitatif merupakan fenomena yang tidak tauhid bahkan anti tauhid.

Sebagai masyarakat muslim yang mempercayai Islam sebagai agama pembebasan (*religious of liberation*), yaitu membebaskan masyarakat manusia dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan, maka menurut Amien Rais kita harus tetap mengupayakan terealisasinya tauhid sosial. Disinilah sangat dibutuhkan sikap seorang muslim yang bukan saja mengedepankan kesalehan individu, sebagai sebuah ekspresi pengabdian dan penghambaan kepada Tuhan, tapi juga kesalehan sosial, sebagai bentuk aktualisasi diri pengabdian kepada Tuhan yang telah menciptakan

⁵ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Mizan Pustaka, Bandung, 1996, hal. 13-14.

mahluk manusia dalam strata yang sama namun dalam heterogenitas etnis, budaya, dan agama.⁶

Konsep "tauhid sosial" ini tampaknya muncul dari Amien Rais sebagai respon terhadap meluasnya persoalan ketidakadilan yang ia lihat. Hal ini biasa dirujuk pada pernyataannya yang retorik:

"Benang merah dari ajaran Islam adalah keadilan. Karena Islam itu merupakan *religion of justice*, maka secara potensial setiap umat Islam bisa menjadi *trouble maker* bagi keamanan yang tidak adil."

Dengan merujuk sosiolog Prof. Gelner, Amien mengatakan bahwa di muka bumi ini, setiap orang Islam bisa menjadi masalah bagi rezim yang mapan yang mempertahankan ketidakadilan, karena orang Islam selalu resah, gelisah, dan selalu ingin mengejawantahkan nilai-nilai keadilan dalam berbagai dimensi kehidupannya.

Dengan mengutip Ibn Hazm, ia juga mengatakan, bila ditengah masyarakat ada kelompok kaya dan miskin, adalah kewajiban si kaya untuk melakukan proses pemerataan sosial ekonomi ke seluruh masyarakat. Dan, menjadi hak dari si miskin untuk mengambil bagiannya dari si kaya. Jadi secara sederhana, konsep tauhid sosial Amien Rais dapat disimpulkan sebagai tuntutan terwujudnya masyarakat yang adil, sekaligus memperoleh ridha Allah.⁷

Berangkat dari gagasan tauhid sosial ini, berbagai kritik dan pemikiran politik Amien Rais banyak dibangun. Kritiknya yang pedas dan lugas yang selama ini disampaikan kepada penguasa Orde Baru, apakah itu menyangkut persoalan hukum, politik dan ekonomi, banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan tauhid sosial-nya.

⁶ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 201-205.

⁷ Muhammad Najib, *Op.Cit*, hal. 60-63.

3.2 High politik

High politics menurut Amien Rais adalah sebagai politik adiluhung yang berdimensi moral serta jauh dari kepentingan perebutan kursi kekuasaan. Sebaliknya *low politics* menurutnya adalah bentuk-bentuk kegiatan politik praktis yang berdimensi kepentingan dan perebutan kursi kekuasaan. Ia menyatakan dirinya hanya akan bergerak pada level *high politics* dan tidak akan bersentuhan dengan *low politics*.⁸

High politics merupakan sentral dan inti filsafat Amien Rais. Seluruh gagasan politiknya dan juga ide pokoknya dalam suksesi kepemimpinan nasional bertumpu pada konsep ini.

Ia mengemukakan pertama kali dalam makalahnya pada seminar bulanan Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta, 13 Oktober 1986.

Berjudul "Hubungan Politik dan Dakwah", makalah itu memaparkan tentang high politics, yang pada waktu itu diterjemahkan sebagai "politik kualitas tinggi" sebagai lawan dari "politik kualitas rendah" (*low politics*). Pembagian tajam atas kedua politik ini dilandaskan pada "tinjauan Islam". Dalam beberapa kesempatan lain setelah itu, ia menyempurnakan terjemahannya menjadi "politik yang luhur, adiluhung dan berdimensi moral etis".

Politik kualitas tinggi memiliki tiga ciri; *pertama*, setiap jabatan politik merupakan amanah dari masyarakat, yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Amanah itu tidak boleh disalah gunakan, misalnya untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan golongannya saja dan menelantarkan kepentingan umum. Kekuasaan harus dipandang sebagai nikmat yang dikaruniakan oleh Allah untuk mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan dan menegakkan orde atau tertib sosial yang egalitarian. Kekuasaan

⁸ *Ibid*, hal. 69.

betapapun kecilnya, harus dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan bersama, sesuai dengan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat luas.

Kedua, setiap jabatan politik mengandung pertanggung jawaban (mas'ulliyah, accountability). Sebagaimana diajarkan Nabi, setiap orang pada dasarnya pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya atas tugas-tugasnya. "Kesadaran akan tanggung jawab ini sangat menentukan penyelenggaraan politik kualitas tinggi", tulis Amien. "Tetapi tanggung jawab ini bukan hanya terbatas dihadapan institusi atau kelembagaan yang bersangkutan, melainkan juga dihadapan Allah, yakni mahkamah yang paling adil kelak di akhirat, keadilan inilah yang justru lebih penting".

Ketiga, kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah, yaitu persamaan diantara umat manusia. Dalam arti luas, ukhuwah melampaui batas-batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, keturunan, dan sebagainya. Kegiatan politik kualitas tinggi akan menghindari gaya politik konfrontatif yang penuh dengan konflik dan melihat golongan lain sebagai pihak yang harus dieliminasi. "Sebaiknya gaya politik yang ditempuh adalah yang penuh ukhuwah, mencari saling pengertian, dan membangun kerjasama keduniaan seoptimal mungkin dalam menunaikan tugas-tugas kekhalifahan."⁹

Sebuah posisi akan menjadi lebih jelas jika dikontraskan dengan lawannya. Begitu pula, high politics pun akan makin terang bila dikontraskan dengan low politics, yang bagi Amien Rais dirumuskan paling gamblang oleh Nicollo Machiavelli, khususnya dalam risalahnya yang terkenal, *Il Principe* (*The prince, Sang Pangeran*).

⁹ Amien Rais, *Filsafat High Politics*, dalam *Ummat*, NO. 25 THN. III, 5 Januari 1998/6 Ramadhan 1418 H

Tiga ciri politik kualitas rendah Macheavellian yang telah diparafrasekan oleh Amien Rais, meliputi: *pertama*, kekerasan (violence), brutalitas dan kekejaman merupakan cara-cara yang perlu diambil oleh penguasa. Cara-cara semacam itu bisa digunakan kapan saja, asal tujuan yang dikejar bisa dicapai. "Pandangan yang semacam ini mendorong manusia yang bergerak dalam bidang politik menjadi 'tega', dan menjadi manusia berdarah dingin", tulisnya. "Kekuasaan sebagai amanah dan nikmat dari Tuhan yang harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak dikenal sama sekali dalam ajaran ini."

Kedua, penaklukan total atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebajikan-kebajikan puncak (*summum bonum*). Politik semacam ini, yang berintikan pada perjuangan merebut kekuasaan (*struggle for power*) dan menguasai pemerintahan, biasanya disebabkan oleh nafsu kuasa manusia yang tidak mengenal batas. Oleh sebab itu, pihak yang sedang berkuasa, kata Machiavelli, harus melakukan penindasan dan penekanan serta penaklukan terhadap musuh-musuh politik. Karena, sekali lagi, penaklukan adalah *summum bonum*. Konsep ukhuwah (persaudaraan diantara umat manusia) tidak sedikitpun terlintas dalam benak Machiavelli.

Ketiga, dalam menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus bisa bermain seperti binatang buas, terutama seperti singa dan sekaligus sebagai anjing pemburu. Kebuasan singa akan membuat takut serigala, sedangkan kelicikan dan kecerdikan anjing pemburu dapat menghindari berbagai jebakan. Seorang penguasa harus bisa menjadi anjing pemburu untuk mengenali berbagai perangkap, dan harus bisa menjadi singa untuk menggertak manusia-manusia serigala. Penguasa yang hanya bersikap seperti singa tidak akan waspada. Sedangkan penguasa yang mampu berperan seperti anjing pemburu akan menjadi pemain politik terbaik, tetapi ia harus tahu bagaimana bersikap seperti musang-berbulu-ayam. Pada umumnya manusia berpikir sangat bersahaja, sehingga seorang penguasa

yang suka menipu pasti akan menemukan orang-orang yang akan membiarkan dirinya untuk ditipu dan harus bisa menggertak.¹⁰

Sebenarnya, istilah *high politics- low politics* muncul lebih sebagai kritik atas elit politik pada masa rezim Suharto yang didominasi oleh politisi oportunist yang selalu berorientasi keatas serta mengabaikan realitas dan aspirasi yang sesungguhnya berkembang di masyarakat. Mereka sibuk membangun realitas semu, sambil mengejar jabatan di eksekutif atau legislatif.¹¹

3.3 Suksesi

Gagasan "suksesi" pertama kali dilontarkan pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya, tahun 1993.¹² Usulan ini menimbulkan pro dan kontra peserta. Yang kontra beralasan, kurang sopan membicarakan persoalan tersebut pada saat Pak Harto baru saja dilantik sebagai Presiden RI untuk keenam kalinya. Tetapi di balik argumen itu ada kekhawatiran, membicarakan masalah tersebut akan membawa resiko besar bagi Muhammadiyah. Pemikiran seperti ini didukung oleh generasi tua, yang disuarakan secara lantang oleh Lukman Harun. Sementara yang pro berargumen, pembicaraan suksesi¹³ harus dilakukan sejak dini, karena ia memerlukan persiapan matang. Pemikiran ini berkembang pada generasi muda yang dimotori oleh Amien Rais. Walaupun sempat masuk dan

¹⁰ M. Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Op. Cit, hal. 32-33.

¹¹ Muhammad Najib, Op. Cit, hal. 70..

¹² Tanwir merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Muhammadiyah setelah Muktamar. Pemikiran Amien Rais tentang suksesi dituliskannya pada sebuah makalah secara detail dan komprehensif, dilengkapi dengan sejumlah argumentasi rasional yang menguatkannya. Makalah yang diberi judul "Suksesi 1998: Suatu Keharusan" itu disampaikan dalam berbagai forum ilmiah, termasuk di LEMHANAS. Makalah ini dapat dibaca pada buku *Suara Amien Rais Suara Rakyat*, Jakarta: Gema Insani Press, hal.21-47.

¹³ Suksesi merupakan istilah yang mengandung makna pergantian pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto. Makna istilah ini dapat dibaca dalam makalah Amien Rais yang berjudul "Suksesi 1998: Suatu Keharusan".

didiskusikan pada sidang komisi, tetapi isu suksesi kemudian tersandung pada sidang pleno. Pimpinan sidang pada saat itu, Almarhum K.H. Achmad Azhar Basyir, yang juga ketua Muhammadiyah, menganggap pemikiran Amien Rais dan kawan-kawan kurang tepat menurut rasa dan etika ketimuran, walaupun sudah tepat menurut logika politik. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk membekukan pembicaraan tentang suksesi. Ini berarti masalah suksesi sama sekali tidak diputuskan dalam keputusan Tanwir.¹⁴

Dien Syamsuddin sendiri menanggapi secara dingin gagasan suksesi yang dilontarkan oleh Amien Rais. Dosen pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah ini menyebut gagasan suksesi tidak lebih dari seruan 'adzan', dan Amien Rais hanyalah tukang adzan (mu'adzin), Mantan Ketua PP. Pemuda Muhammadiyah menambahkan bahwa menjadi mu'adzin berarti, *pertama*, tidak akan pernah menjadi imam, kedua, umat belum tentu meresponnya,. Tugas dari seorang mu'adzin hanya menyeru dan berseru, "*hayya 'ala demokrasi, hayya 'ala sukses*". Predikat muadzin ini sendiri diakui oleh Amien Rais. Ia misalnya menulis;

"Saya memang seorang mu'adzin. Saya adzan itu berarti tugas. Jadi tugas telah saya tunaikan. Kemudian tugas para negarawan, politikus, ulama, intelektual, tokoh partai dan LSM adalah memperhatikan adzan saya, untuk bagaimana membuat langkah-langkah yang lebih teduh dan realistis menganggap isu-isu besar itu."¹⁵

Tetapi dengan keputusan Tanwir itu tidak berarti isu suksesi kemudian terkubur. Justru sebaliknya ia melesat keluar sidang Tanwir, sehingga menjadi wacana diskursus publik tentang kepemimpinan nasional. Hampir seluruh media massa mengangkat isu ini selama sehari-hari.¹⁶

¹⁴ Muhammad Najib, Op. Cit, hal. 99-100.

¹⁵ Ma'mun Murod Al-Brebesy, Op.Cit, hal.120.

¹⁶ Muhammad Najib, Op. Cit, hal. 101.

Persoalan yang menarik dalam kaitan ini adalah mengapa suksesi tidak terjadi pada 1993, paling tidak ada tiga kemungkinan; *pertama*, adanya invisible hands atau tangan-tangan yang tidak kelihatan yang merelay agar tidak terjadi suksesi kepemimpinan nasional pada 1993. Pembicaraan tentang suksesi, konsensus nasional, mekanisme kepemimpinan nasional dan hal-hal di seputar masalah ini ternyata cepat menguap dan suasana politik kembali ke model "kebulatan tekad".

Kedua, budaya politik yang berintikan ewuh-pakewuh masih sangat kuat dalam masyarakat kita. Setiap tokoh yang ditanya apakah bersedia menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden selalu memberikan jawaban yang samar-samar, tidak jelas antara ya dan tidak. Dalam situasi yang seperti ini sang incumbent (pemimpin yang masih berkuasa) tetap saja kuat karena tidak muncul alternatif pemimpin yang akan menggantikannya.

Ketiga, kekuatan-kekuatan sosial politik diliputi keraguan dan spekulasi seakan-akan pergantian kepemimpinan nasional beresiko tinggi dan karena itu tidak perlu ada perubahan terhadap status quo. Bahwa dengan terus menunda pergantian kepemimpinan nasional justru akan memperparah masalah itu sendiri, nampaknya tidak begitu disadari oleh kekuatan-kekuatan sosial politik kita.¹⁷

Disamping itu, Amien Rais juga mengemukakan sejumlah alasan mengapa suksesi 1998 adalah sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan; *pertama*, pemimpin nasional yang sekarang ini telah berlangsung sejak 1967, sehingga pada 1998 berarti telah berjalan 31 tahun. Karena sudah lama berkuasa, segenap unsur pimpinan nasional kiranya cukup arif untuk memahami aksioma politik yang diungkap oleh Lord Acton, Yakni *power tends to corrupt and absoluts power tens to corrupt absolutely*. Kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan yang mutlak cenderung untuk korup

secara mutlak pula. Aksioma politik ini berlaku secara universal, baik di Barat maupun di Timur.

Kedua, pimpinan nasional atau elite yang terlalu lama berkuasa dapat melahirkan penyakit kultus individu (*the cult of the individual*). Dulu sebagai bangsa kita melakukan kultus individu terhadap Bung Karno, sampai-sampai MPRS mengangkat Bung Karno sebagai presiden seumur hidup. Sudah tentu kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama sebagai akibat tidak berani menoleh figur lain sebagai pimpinan nasional yang baru. Hormat dan cinta kita pada seorang pemimpin tidak boleh berlebihan sehingga dapat mematikan akal sehat. Suksesi, rotasi atau regenerasi elite adalah sebuah keharusan dalam sistem demokrasi. Berbeda dengan sistem monarki yang tidak mengenal pergantian pimpinan terkecuali bila pimpinan itu mati, maka demokrasi mengatur rotasi elite itu lewat sebuah konstitusi. Disamping itu dalam sistem demokrasi, masa jabatan kepala negara biasanya dibatasi, apakah untuk satu atau dua periode. Tanpa adanya pembatasan masa jabatan kepala negara, proses politik dapat berjalan semakin jauh dari demokrasi dan dapat memperkokoh *vested interest* lapisan elite secara irrasional.

Ketiga, kelompok elite yang terlalu lama memegang kekuasaan atau pemerintahan cenderung mengalami penumpukan visi dan kreativitas. Hal ini mudah dipahami mengingat sebuah pimpinan nasional yang sudah terjebak dalam rutinisme akan menjadi kurang peka terhadap dinamika perubahan yang terjadi di sekeliling. Keputusan-keputusan yang diambil oleh unsur-unsur kepemimpinan nasional menjadi *out of touch* dari realitas sehingga menjadi keputusan yang anakronistik, keputusan yang tidak pas dengan kebutuhan rakyat banyak.

¹⁷ M. Amien Rais, *Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 7-9.

Keempat, sebuah lapisan yang sudah kelewat lama memegang kekuasaan atau pemerintahan secara perlahan akan meyakini dirinya adalah personifikasi stabilitas dan eksistensi negara. Apalagi sindrom Louis XIV dari Prancis yang mengatakan *l'état c'est moi* sampai menghinggapi seorang pemimpin, maka setiap kritik yang diarahkan kepadanya dianggap sebagai kritik terhadap ideologi negara.¹⁸

Meskipun Amien Rais tidak pernah lelah mensosialisasikan idenya, tetapi masalah suksesi berangsur-angsur surut bersama jalannya waktu, dan baru muncul kembali sebagai wacana publik pada tahun 1997 menjelang dan pasca pemilu. Banyaknya cendekiawan dan mahasiswa yang melibatkan diri dengan ikut mengembangkan isu suksesi ini untuk mendorong dukungan massa untuk ikut bergerak, tidak bisa dilepaskan dari munculnya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi. Krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis kepemimpinan dan pudarnya kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru, yang berujung pada tuntutan agar Soeharto segera turun.

Semula tuntutan Soeharto turun muncul samar-samar, dimulai dari kritik Amien Rais terhadap Kabinet Pembangunan VII, yang dikatakan tidak akan bisa mengemban tugas beratnya. Disamping faktor hilangnya kepercayaan terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto, persoalannya bertambah runyam dengan direkrutnya sejumlah menteri "bermasalah", yaitu mereka yang punya indikasi kuat terkena penyakit korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Lambat laun tuntutan Amien semakin transparan dengan meminta Soeharto untuk segera turun dari jabatannya sebagai presiden RI.¹⁹

¹⁸ Ibid, hal. 10-16

¹⁹ Permintaan Amien Rais agar Soeharto segera turun dari posisinya sebagai Presiden RI dikumandangkan secara lugas pertama kali saat ia memberikan sambutan pada acara pemakaman empat mahasiswa Trisakti yang gugur saat berdemonstrasi. Permintaan serupa diulangi lagi ketika ia, atas nama MARA, menyampaikan tiga tuntutan setelah terjadinya kerusuhan 13 dan 14 Mei yang melanda Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Lalu, permintaan yang sama bahkan dengan kalimat yang sangat tegas, "Soeharto harus turun!" diutarakannya saat berbicara di depan puluhan ribu demonstran yang sedang menduduki Gedung DPR/MPR Senayan.

BAB IV
PERANAN AMIEN RAIS DALAM GERAKAN
REFORMASI DI INDONESIA

4.1 Amien Rais dalam Masa Transisi

4.1.1 Sebagai aktor Politik

Amien Rais adalah tokoh Muhammadiyah yang berkembang besar di kampus. Sebelum menjadi elite muda di perserikatan, pemikiran-pemikirannya telah ikut mewarnai wacana pemikiran Islam di Indonesia. Ini terjadi sesaat setelah ia pulang dari studi doktornya di Universitas Chicago, Amerika Serikat, di tahun 1980-an.

Pemikirannya tak hanya berdasar pada disiplin ilmunya tentang politik Timur Tengah. Tetapi juga pada bidang ilmu yang lain. Sebagai orang kampus, ia juga telah dikenal sebagai salah satu pemikir Islam. Pemikiran-pemikiran keagamaannya segera menjadi bahan perbincangan generasi muda kampus dan juga angkatan muda Muhammadiyah.

Karena itu pula, namanya menjadi cepat populer di lingkungan ormas Islam Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan. Pemikiran-pemikirannya mengantarkannya¹ menjadi bagian dari elite Muhammadiyah. Sebelum menjadi PP Muhammadiyah, menggantikan almarhum K.H. Azhar Basyir, ia dipercaya sebagai Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah.

Amien Rais merupakan seorang diantara sekian generasi baru elite intelektual yang turut mendirikan ICMI tahun 1990, serta hubungan Amien dan Habibie yang semakin akrab, menjadikan Amien tokoh yang semakin diperhitungkan baik dalam Muhammadiyah dan umat Islam, maupun dalam pentas popolitik nasional.

Sembari aktif dalam kepemimpinan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Amien masih tetap menjadi orang kampus. Di dalam komunitas inilah ia bergulat dengan pemikiran-pemikiran tentang masalah sosial politik. Di kampus ia harus tetap bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran kritis dan obyektif. Amien dituntut bicara dengan bahasa-bahasa lugas, sesuai tuntutan ilmu pengetahuan.

Di depan mahasiswanya, Amien harus menjelaskan teori-teori sosial politik dengan berbagai contoh empiris. Dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah, ia mengungkapkan realitas yang ada, tanpa melakukan manipulasi data. Berbagai kenyataan sosial-politik yang menjadi perhatiannya dikemukakan secara lugas dengan bahasa yang denotatif.

Amien menjadi pemimpin umat dengan sebagian kakinya masih melekat di kampus. Sementara satu kakinya meniti jalur politik dalam posisinya sebagai pemimpin umat Muhammadiyah dan para cendekiawan Muslim, kaki lainnya tidak bisa meninggalkan tugasnya sebagai dosen yang serba lugas dan terus terang.²

Muhammadiyah memang tidak dikenal sebagai gerakan politik keagamaan. Namun posisinya sebagai pemimpin umat, sulit baginya untuk menghindarkan diri dalam perdebatan-perdebatan politik. Sebagai pemimpin dari suatu ormas Islam, ia harus turut serta dalam pentas politik negeri ini.

Amien Rais, mengusulkan agar para anggota MPR/DPR yang akan dilantik pada 1 Oktober 1997 mengadakan dialog nasional dengan melibatkan masyarakat luas melalui tokoh-tokohnya untuk mendapatkan masukan tentang berbagai persoalan mendasar yang dihadapi bangsa. Satu diantaranya adalah mengenai pimpinan nasional. Usulan ini muncul karena Amien melihat para calon anggota DPR/MPR yang akan mengemban amanat

¹ Arief Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*, Pustaka Pelajar Offset, 1996, hal. 99.

rakyat pada waktu itu bukanlah tokoh-tokoh yang mengakar kebawah, tetapi lebih karena akses yang dimilikinya pada pusat-pusat kekuasaan sehingga mereka lebih bergantung keatas.

Usulan ini menimbulkan pro dan kontra, serta mendapat perhatian publik secara luas, sehingga muncul polemik terbuka tokoh-tokoh masyarakat. Mereka yang mewakili kalangan "resmi" tidak setuju dengan ide-ide yang mengusik status quo, sementara kalangan "bebas" umumnya menyambut ide dialog nasional dengan antusias.³

Tabligh Akbar yang berlangsung 15 Februari 1998 diisi dengan pidato politik Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais. Dalam pidatonya yang berjudul Harapan-Harapan Muhammadiyah Kepada MPR dan Masyarakat,⁴ Amien Rais membacakan sepuluh pesan moral yang ditujukan kepada masyarakat, anggota MPR, pimpinan nasional dan pemerintah baru. Sepuluh pesan moral ini berkisar tentang himbauan kepada masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan ketenangan menjelang dilaksanakannya SU MPR 1998. Sedangkan kepada anggota MPR yang akan bersidang dihimbau agar menangkap aspirasi rakyat.⁵

Sedikitnya 50 tokoh nasional tanggal 14 Mei 1998 di Jakarta membentuk kelompok pro-demokrasi yang baru, bernama Majelis Amanat Rakyat (MAR), yang menjadi wadah kerjasama berbagai organisasi dan perorangan yang memiliki komitmen terhadap reformasi untuk demokrasi, dibentuk untuk mendorong terbukanya jalan kearah keadaan situasi yang damai dan sesuai dengan tuntutan reformasi.

² Ibrahim Ali Fauzy, *Ada Undang di Balik Busang: Dokumentasi Pers Kasus Amien Rais*, Mizan Pustaka, Bandung, 1997, hal. 275-276.

³ Muhammad Najib, *Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*, Serambi Ilmu Semesta, 1999, hal.105-107.

⁴ A:\catcha.com-http://www.kompas.com/9802/13/UTAMA/amim.htm.tablighakbar.htm, *Amien Rais Bantah Dipanggil BIA*

⁵ Kompas, 16 Februari 1998.

MAR ini dibentuk, kata juru bicara MAR, Amien Rais, setelah mereka melihat perkembangan di tanah air yang makin memprihatinkan dengan terjadinya letupan-letupan protes dan kemarahan massal, khususnya terhadap pemerintah.

Pertemuan pembentukan MAR berlangsung di Galeri Cafe, Jakarta. Bersama dengan pembentukannya, MAR mengeluarkan pernyataan yang berisi tiga butir; *pertama*, MAR menyerukan kepada presiden Soeharto untuk mengundurkan diri dengan kebesaran jiwa dan kehormatan, demi kepentingan bangsa agar seluruh proses reformasi untuk demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan damai. *Kedua*, menyerukan kepada aparat keamanan untuk menghindarkan diri dari segala bentuk penggunaan kekerasan kepada rakyat sehingga keadaan yang lebih buruk dapat dicegah. *Ketiga*, menghimbau kepada mahasiswa, generasi muda dan rakyat pada umumnya untuk secara sungguh-sungguh dan secepat-cepatnya menciptakan perubahan situasi yang memulihkan segera kehidupan masyarakat secara wajar.⁶

Menjelang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998, politik semakin memanas, terutama antara yang pro dan anti Habibie. Kelompok anti Habibie yang bergabung dalam Aksi Rakyat Bersatu dan kelompok masyarakat seperti Koalisi Nasional akan menumpahkan massa ke senayan. Agenda mereka ada empat hal; menolak Sidang Istimewa, mengganti Habibie dengan presidium pemerintahan transisi, percepat pemilu, dan adili Soeharto. Sedangkan kelompok yang pro Habibie berupaya menjaga gedung DPR/MPR sebagai tempat Sidang Istimewa dilaksanakan sehingga kelompok penentang tidak dapat menguasai gedung tersebut.

Ada beberapa pihak yang merasa prihatin dengan kondisi ini dan mengupayakan pertemuan antara tokoh-tokoh reformis di Indonesia, antara

⁶ Kompas, 15 Mei 1998

lain; Ketua Umum DPP PAN Amien Rais, Ketua PB NU K.H Abdurrahman Wahid, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pertemuan mereka dianggap sangat penting terutama dalam menyelamatkan agenda reformasi.

Para tokoh tersebut dinilai memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat, sehingga banyak pengamat yang mengatakan bahwa hanya koalisi GusDur-Amien-Megawati dan Sri Sultan yang mampu mengembalikan arah reformasi karena ketiga tokoh tersebut memiliki basis dukungan yang berbeda tetapi sama-sama luas: Amien populer di wilayah perkotaan (urban), megawati di pinggiran, dan Gus Dur di pedesaan (rural).⁷

Pada tanggal 10 November 1998 pertemuan dilaksanakan dan dikenal dengan dialog Ciganjur. Dari pertemuan ini dikeluarkan keputusan-keputusan politik yang tingkat otoritasnya lebih dipercaya oleh rakyat daripada suara MPR di Senayan. Pertemuan empat tokoh di rumah Gus Dur menghasilkan kesepakatan delapan fatwa politik.

Deklarasi Ciganjur yang secara riil mendapat dukungan massa baik dari kelompok Islam maupun nasionalis membuat SI MPR berlangsung klimaks dan telah memaksa fraksi-fraksi mengubah laporan pemandangan umumnya yang akan mereka bacakan keesokan harinya. Dengan masuknya beberapa butir deklarasi Ciganjur dalam sesi pemandangan umum masing-masing fraksi di SI MPR, Amien Rais menyambut baik dan mengharapkan SI MPR semakin mampu merespon semangat reformasi dan menyuarakan hati nurani rakyat.⁸

Hasil kegiatannya yang luar biasa oleh banyak kalangan dinilai sebagai sosok terpenting dalam proses reformasi. Ia diterima di kalangan kampus dan masyarakat. Dalam konteks perjuangan demokrasi. Ketika

⁷ Sutpyo R. & Asmawi, *PAN Titian Amien Rais Menuju Istana*, Titian Ilahi Press, Yogyakarta, 1999, hal. 75-76.

⁸ Ibid, hal. 98

muncul gelombang demokrasi secara besar-besaran, Mei 1998, yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto, karena dipandang tidak mampu mengatasi krisis yang multi sektoral, Amien Rais termasuk tokoh yang berada di garda paling depan dalam menyuarakan reformasi bersama-sama dengan mahasiswa. Atas perannya ini, banyak pihak yang memberi predikat Amien Rais sebagai "bapak reformasi", termasuk 20 perwakilan perguruan tinggi di Indonesia yang memberikan penghargaan reformasi. Disamping itu penghargaan Amien Rais yang lain, diantaranya penghargaan dari Universitas Islam Indonesia (UII Awards), majalah Ummat menyebutnya sebagai "Tokoh Tahun 1997", organisasi mahasiswa tingkat persiapan bersama Institut Pertanian Bogor menganugerahinya dengan Reformasi Award.⁹

4.1.2 Keinginan mewujudkan Demokrasi

Sebutan demokrasi sebagai sistem yang ideal untuk saat ini tampaknya telah menjadi semacam kesepakatan (*ijma'*) para ilmuwan politik tidak terkecuali Amien Rais. Sebagai ilmuwan politik (*political scientist*), Amien Rais juga sepakat bahwa demokrasi merupakan sistem paling ideal untuk saat ini. Demokrasi sendiri oleh Amien Rais bisa ditafsirkan dengan berbagai macam pengertian, namun esensinya adalah tetap, yaitu kedaulatan harus diberikan kepada rakyat. Lewat demokrasi, juga akan menghindarkan adanya tirani mayoritas atas minoritas dan juga tirani minoritas atas mayoritas yang sama-sama bahaya. Bukan hanya itu, Amien Rais juga menolak pandangan yang menyatakan bahwa demokrasi hanya cocok untuk dunia barat. Bagi Amien Rais, demokrasi juga dipandang paling sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁰ Jika Amien mendukung

⁹ Gatra, 6 Juni 1998, hal. 24.

¹⁰ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Negara*, P.T Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 221.

gagasan demokrasi adalah demokrasi sebagai praktek etika keagamaan dalam dinamika politik, sehingga demokrasi dan atau demokratisasi merupakan jalan mencapai suatu tata politik yang kembali merupakan praktek etika keagamaannya. Dalam hubungan demikian itu, keberpihakan Amien terhadap demokrasi merupakan pilihan strategis bagi tujuan kehidupan politik yang dicita-citakan, yaitu suatu kondisi kehidupan kemasyarakatan yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.¹¹

Pandangan Amien Rais mengenai konsep demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan rakyat. Dimana kehidupan politik dan pemerintahan yang menganut prinsip demokrasi yang sesungguhnya, akan membawa pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.¹²

Pandangan mengenai demokrasi ini mengantarkan pada pemikiran mengenai keabsahan oposisi dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan yang menganut prinsip demokrasi pada hampir semua negara di belahan dunia manapun, keberadaan kelompok oposisi diakui secara resmi sebagai kekuatan politik yang menentukan. Namun selama pemerintahan Orde Baru, terminologi ini merupakan salah satu dari banyak teori politik yang tidak pernah dikenal dalam praktek demokrasi di Indonesia. Jangankan untuk mengakomodir dan melegalisasinya, untuk menyebutnya saja seolah adalah kata-kata yang tabu.¹³

Kelompok oposisi akan membantu penguasa memperkecil kemungkinan berbuat kesalahan. Bahkan sejarah politik dunia membuktikan cerita sukses satu rezim politik tidak terlepas dari kehadiran kelompok oposisi

¹¹ Arief Afandi, Op.Cit, hal. 102.

¹² Sidarta Gautama & Aries Budiono, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih Menurut 4 Tokoh Reformasi: Amien Rais, Emil Salim, Nurcholis Madjid*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 100.

¹³ Ibid, hal. 103.

yang kuat. Sebaliknya, sekali suatu rezim politik dibangun di atas basis legitimasi yang variatif dan luas, rezim itu akan tumbang menyakitkan jika tidak ditopang kekuatan oposisi.¹⁴

Sebagai ilmuwan politik yang banyak menulis tentang Islam dan politik. Amien Rais mencirikan lima prinsip demokrasi dalam Islam. *Pertama*, pemerintahan harus dilandaskan pada *keadilan*. Ini bermakna tidak hanya keadilan dan kesetaraan di depan hukum, tetapi juga keadilan hukum dan ekonomi. Keadilan merupakan nilai yang paling penting dalam hukum Islam.

Kedua, sistem politik harus dilandaskan pada prinsip *syura* dan musyawarah. Ini berarti bahwa para pemimpin politik hanyalah abdi rakyat dan harus dipilih oleh rakyat dalam pemilihan yang bebas. Sebuah monarki, misalnya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Suatu kerajaan yang rajanya hanya menjadi figur simbolis dan kekuasaan sejati terletak di tangan rakyat adalah jauh lebih baik dari sudut pandang Islam daripada sebuah monarki absolut.

Ketiga, terdapat prinsip kesetaraan. Islam tidak membedakan orang atas dasar gender, etnik, warna kulit, atau latar belakang sejarah, sosial atau ekonomi, dan lain-lain. Islam mengajarkan hidup berdampingan secara damai dengan non-Muslim. Tetapi kaum muslim harus mengambil sikap tegas terhadap atheisme. Mereka boleh hidup dengan cara mereka sendiri, tetapi tidak boleh dengan cara apapun mengganggu urusan masyarakat muslim. Amien Rais menegaskan bahwa yang ia maksudkan dengan kesetaraan adalah kesetaraan dalam hukum, bukan dalam arti faktual. Kesetaraan faktual mengindikasikan tidak ada perbedaan sama sekali di antara orang-orang.

Keempat, Kebebasan didefinisikan sebagai kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, hak mendapatkan pendidikan

¹⁴ Gouzali Saydan, *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia: Potret Konflik Politik Pasca*

dan pekerjaan, hak untuk hidup dalam kebebasan dan keamanan, kebebasan mengadakan gerakan, dan sebagainya.

Kelima, pertanggungjawaban: para pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat atas kebijakan-kebijakan mereka. Sebuah pemerintahan yang bertindak secara amoral dan menindas harus digulingkan.¹⁵

Prinsip-prinsip moral yang dimaksud Amien Rais, *pertama*, pemerintahan itu ditegakkan untuk menjamin adanya *equality of opportunity* bagi setiap warga negara. Jadi ada persamaan kesempatan warga negara untuk mengembangkan kariernya, apakah itu dibidang ekonomi maupun politik. *Kedua*, ada semacam *brotherhood*, persaudaraan antara sesama warga negara, terlepas dari perbedaan asal-usul suku, ras, atau bahkan agamanya. *Ketiga*, adanya prinsip musyawarah (*syura*), tukar pendapat, memperbolehkan perbedaan pendapat untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang lebih relevan dan lebih benar.

Kesepakatan Amien Rais menjadikan demokrasi sistem yang ideal, setidaknya didasarkan pada; *pertama*, demokrasi dipandang lebih mampu menjamin berlangsungnya mekanisme *check and balances* antara mereka yang sedang berkuasa dengan mereka yang sedang tidak berkuasa dengan mematuhi aturan-aturan permainan secara legal konstitusional.

Kedua, demokrasi menjamin setidaknya empat kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan pers (*freedom of pers*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), dan kebebasan dari rasa takut (*freedom of fear*).¹⁶ *Ketiga*, dalam sistem politik yang demokratis berlaku prinsip *the people control the leaders* dan bukan sebaliknya. Prinsip ini adalah prinsip yang paling penting dalam demokrasi.

Pemilu dan Nasib Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 159.

¹⁵ Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Mizan Pustaka, Bandung, 1998, hal. 75.

Sedang prinsip *the leaders control the mass* adalah prinsip ororiterisme. Amien juga sepakat dengan sistem demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*).

Keempat, dalam sistem demokrasi ada kesediaan untuk melakukan *sharing of power* dengan pihak lain agar tercapai keseimbangan harmonis diantara kekuatan sosial politik, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang menjadi warga negara kelas dua. *Kelima*, demokrasi menjamin rakyat untuk menempatkan wakil-wakilnya di lembaga-lembaga perwakilan secara bebas. *Keenam*, dalam sistem demokrasi juga ada sistem aturan main dilandaskan pada prinsip-prinsip moral yang benar pula.

Dengan pemahaman demokrasi seperti ini, tidak heran kalau Amien Rais tampak begitu kecewa atas pelaksanaan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang diharapkan lebih baik dari dua demokrasi yang pernah berlaku sebelumnya, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dalam prakteknya cenderung bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Amien Rais misalnya mencontohkan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan, seperti MPR dan DPR yang masih menjadi sub ordinasi dari kekuasaan eksekutif.

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun secara tulisan, selama rezim Orde Baru berkuasa belum berjalan dengan wajar, karena ada semacam *self-censorship* dalam hampir semua kalangan. Mekanisme terpenting demokrasi, *check and balances* tidak dapat berjalan secara wajar, akibatnya penguasa tidak tahu secara persis kesalahan-kesalahan atau penyelewengan-penyelewengan yang dilakukannya.

Demokrasi selama ini juga sering dinilai dari seberapa jauh rakyat ikut berpartisipasi dalam proses fomulasi kebijakan nasional. Apabila rakyat

¹⁶ M. Amien Rais, "Suksesi 1998: Suatu Keharusan", Makalah, disampaikan pada seminar bertema, "Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Suksesi di Indonesia", oleh Civitas Akademika, Universitas Brawijaya, Malang, 1 Februari 1994.

hanya diminta untuk berperan serta dalam implementasi kebijakan dan tidak tahu tentang proses formulasi kebijakan, maka sulit kiranya mengatakan bahwa demokrasi sudah benar-benar berjalan. Hal inilah yang terjadi di Indonesia. Demokrasi Pancasila pada prakteknya ternyata hanya menguntungkan elite politik, elite militer dan elite ekonomi.¹⁷

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan (power) politik dijalankan atas *rule of law*, bukan sebaliknya, *rule of men*. Hal yang disebut terakhir menurut Amien Rais tidak terdapat dalam kamus demokrasi melainkan hanya terdapat dalam kamus otoriterisme. Disayangkan praktek yang kedua, *rule of men*, justru telah menjadi semacam budaya di Indonesia. Banyak orang yang merasa dirinya berada di atas hukum. Kenyataan ini seolah-olah mendukung kebenaran akan kata-kata Cicero, *omnes legum servi sumus ut liberi esse possimus*, kita semua sebenarnya adalah budak hukum, sehingga dapat menjadi bebas.¹⁸

Merujuk pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia semenjak kemerdekaan sampai tumbanganya rezim Orde Baru, Amien Rais menekankan tentang perlunya keseriusan untuk menegakkan demokrasi. Bagi Amien Rais, esensi reformasi adalah menegakkan demokrasi yang sebenarnya.

Amien Rais juga mengingatkan tentang perlunya upaya terus-menerus untuk mewujudkan demokratisasi. Menurut Amien Rais ada empat persoalan yang perlu terus-menerus diupayakan, *pertama*, mempertahankan agar bangsa Indonesia memiliki kebebasan berbicara dan kebebasan pers, seperti telah dirintis pemerintahan Habibie. *Kedua*, harus ada sportivitas dalam memainkan "olah demokrasi". Demokrasi menurut Amien memiliki aturan, yaitu yang menang menjadi pemimpin dan yang kalah berada di luar,

¹⁷ Loc Cit.

¹⁸ M. Amien Rais, "*Kuasa, Tuna Kuasa, dan Demokratisasi Kekuasaan*", Teks Pidato, pada pengukuhan Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 10 April 1999.

menjadi oposisi, untuk terus-menerus memberikan kritikan, agar kekuasaan tidak menyeleweng. *Ketiga*, bangsa Indonesia harus menghilangkan sikap-sikap feodalistik dan paternalistik, seperti yang subur semasa rezim Orde Baru.¹⁹

Ada tiga hal penting yang semestinya ditempuh dalam mengupayakan tercapainya proses demokratisasi. *Pertama*, perlunya pendidikan politik pada massa rakyat. Dengan adanya pendidikan politik, diharapkan masyarakat memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat, sekalipun berbeda dengan pendapat penguasa. *Kedua*, penguasa sendiri harus diyakinkan bahwa hanya bila memiliki legitimasi atau keabsahan yang kuat kalau benar-benar didukung oleh rakyat, bukan karena ketakutan atau tekanan, tetapi karena kepercayaan. *Ketiga*, Amien Rais percaya bahwa kaum intelektual juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam memasyarakatkan gagasan-gagasan demokrasi, meski untuk melakukan hal ini masih banyak membutuhkan waktu²⁰

Masih soal demokrasi, Amien Rais juga sering menggunakan pendekatan demokrasi dalam konteks perjuangan umat Islam. Dalam pandangan Amien, bila umat Islam ingin membangun masyarakat ke arah yang lebih baik, maka tidak bisa lain kecuali perjuangan politik umat Islam disalurkan lewat demokrasi. Demokrasi menurut Amien Rais adalah sebuah sistem dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan aspirasi dari rakyat harus mengejawantah di dalam kehidupan eksekutif dan legislatif. Konsep inilah yang kemudian dikenal dengan istilah politik representasi. Dalam pandangan Amien Rais, politik representasi merupakan esensi demokrasi.

Dalam prinsip Amien Rais, bila demokrasi diberikan secara bebas, umat Islam pasti akan mendapatkan kehidupan yang representatif. Mengingat

¹⁹ Materi Ceramah M. Amien Rais pada Konggres Umat Islam, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 4 November 1998.

²⁰ Sidarta Gautama & Aries Budiono, Op. Cit, hal. 101

hanya lewat demokrasi inilah, sesungguhnya umat islam akan merasa aman untuk membangun masa depannya. Namun Amien Rais juga menegaskan bahwa proses representasi ini pada saatnya nanti akan menjadi bentuk yang paling ideal bila digabungkan dengan meritokrasi, yaitu suatu proses rekrutment orang-orang dari berbagai lembaga negara maupun pemerintah berdasarkan kriteria atau kemampuannya.²¹

Jadi, esensi demokrasi adalah empat macam kebebasan yang sangat asasi yang harus dimiliki oleh rakyat (kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan untuk sejahtera – *Freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from want*). Esensi demokrasi juga mencakup partisipasi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, berjalan mekanisme *check and balances* dan tegaknya *rule of law*.²²

4.1.2 Keadaan Indonesia

Krisis ekonomi di Indonesia berawal dari krisis moneter di Asia. Thailand menjadi negara pertama yang tertimpa krisis itu dan menyebar ke negara-negara yang lainnya di Asia seperti Malaysia, Korea Selatan dan Indonesia. Anjloknya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika pada bulan Juli 1997 membawa dampak yang lebih parah dibanding negara Asia lainnya.

Ada beberapa persoalan yang membuat krisis ekonomi di Indonesia lebih parah dibanding negara-negara lain. *Pertama*, sistem perekonomian Indonesia tidak memiliki fundamental yang kuat. Lemahnya fundamental tersebut ditunjukkan oleh tidak jelasnya sirkulasi perekonomian bangsa. Terbukti selama ini tidak ada peraturan yang transparan mengenai

²¹ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op.Cit*, hal. 131-132.

²² M. Amien Rais, *Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, hal. 10.

pembuatan, pengesahan serta implementasi kebijakan ekonomi. Kebijakan itu sering dilakukan sewenang-wenang oleh presiden dengan menerbitkan kepres, inpres dan beberapa peraturan lainnya. Akibatnya tumbuh dan berkembang praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme yang merupakan bukti ketidakjelasan sistem itu.

Kedua, krisis yang terjadi di Indonesia pada tahap berikutnya telah menciptakan krisis politik. Perpaduan dua aspek tersebut telah membawa pada kondisi krisis di Indonesia lebih kompleks di banding negara-negara lain. *Ketiga*, persoalan yang lebih umum, bahwa krisis yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh grand design Orde Baru yang pada satu sisi rentan terhadap menumpuknya kekayaan-kekayaan dan pada sisi lain pemerataan menjadi lebih asing dan tidak pernah terwujud. Konsep Orde Baru yang memprioritaskan pada pertumbuhan telah menempatkan aspek ekonomi sebagai panglima telah berakibat pada timpangnya proses pembangunan. Ini mengakibatkan persoalan politik, hukum dan yang lainnya di tempatkan jauh dibawah ekonomi. Kecenderungan yang terjadi kemudian adalah politik, hukum dan sosial budaya bahkan keamanan menjadi legitimasi bagi proses pertumbuhan ekonomi.

Awal tahun 1998, nilai tukar rupiah semakin merosot tajam. Hal ini dipandang sebagai gejala ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kredibilitas pemerintah sampai pada titik terendah. Penyebabnya adalah karena langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam merespon krisis selama ini hanya bersifat *tambal sulam* dan tidak jelas. Krisis moneter yang mengakibatkan krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis nasional yang sangat serius. Indikasi semacam ini dapat dilihat dari semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.²³

²³ A. Malik Harmain dan M.F Nurhuda Y, *Mengawal Tansisi: Refleksi atas Pemantauan Pemilu 1999, Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia: Pengurus Besar Pergerakan Islam Indonesia (JAMPPI- PB PMII)*, 2000, hal. 1-3

Menyeruaknya aksi demonstrasi yang di dukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, telah menempatkan Soeharto sebagai penyebab dari semua persoalan. Tuntutan paling keras adalah menuntut Soeharto mundur dari kekuasaannya.

Pada tanggal 20 Mei pimpinan DPR menyatakan akan segera mengadakan Sidang Istimewa MPR jika presiden tidak secepatnya mengundurkan diri. Harmoko mengumumkan dead line bahwa jika sampai batas waktu tanggal 22 Mei 1998 tidak menyatakan pengunduran dirinya, maka pimpinan DPR/MPR akan melakukan rapat dengan seluruh fraksi yang dijadwalkan tanggal 25 Mei 1998, untuk membahas pelaksanaan SI MPR. Hari itu juga DPR mengeluarkan surat peringatan kepada presiden. Pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah hampir 32 tahun berkuasa. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.²⁴

Menurut Amien Rais, reformasi adalah proses untuk menegakkan keadilan multi dimensional bagi rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Hal itu dapat dilakukan apabila kita tidak lagi mengukulkan seseorang sebagai suatu figur atau tokoh yang sangat didewa-dewakan.²⁵ Turunnya Soeharto dari jabatan presiden, ibarat terbukanya pintu kearah reformasi total dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan moral. Dalam persepsi mahasiswa, reformasi tidak mungkin dapat dilaksanakan selama kepemimpinan nasional masih ada di tangan Soeharto. Penyerahan kekuasaan dari Soeharti kepada B.J. Habibie masih menjadi kontroversial, sebagian melihat bahwa penyerahan kekuasaan itu seperti yang terjadi dalam sistem monarki. Ibarat Raja menyerahkan

²⁴ Ibid, hal. 7

²⁵ A:\diskusi.yahoo.htm/http://www.washington.kbri.pro/CarakaOnline, *Diskusi dengan Amien Rais di Washington, D.C.*

kekuasaan kepada putra mahkota. Singkatnya, legitimasi Habibie sebagai presiden masih menjadi bahan perdebatan.

Amien Rais sebagai kaum reformis senior, terkesan lebih memahami situasi yang berkembang di lapangan. Ia tidak lagi mempersoalkan aspek konstitusional dalam penyerahan kekuasaan, namun menyebut ini sebagai pemerintahan transisi. Artinya, mereka tidak menuntut Habibie mundur, melainkan minta Habibie mempersiapkan pemilihan umum yang dilaksanakan dengan perangkat hukum yang sudah diperbaharui total. Mereka menuntut pelaksanaan Sidang Umum MPR hasil pemilu itu guna memilih presiden dan wakil presiden baru. Dengan demikian presiden dan wakil presiden baru akan mendapat legitimasi dari rakyat.²⁶

Menurut Amien Rais, cara menyelesaikan kemelut sosial politik sekarang ini adalah dengan kembali ke prinsip demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat. Untuk mengetahui aspirasi sesungguhnya bagaimana dan apa yang diinginkan rakyat yaitu melalui pemilihan umum (Pemilu) yang jujur, adil, bebas, langsung, dan rahasia. Karena hanya melalui pemilu yang jujur, kita dapat mengetahui apa yang diinginkan rakyat.²⁷

Namun, sejak naiknya Habibie menggantikan Soeharto, praktis tidak ada perubahan yang berarti. Berbagai kebobrokan masih terjadi, mulai dari praktek korupsi hingga pelanggaran hak asasi. Misalnya, kasus pembantaian yang tetap terjadi di Aceh, Timor-Timur serta kasus Semanggi.

Kemandegan proses reformasi dan redemokrasi yang terjadi dalam era transisi pemerintahan Habibie cukup bisa dipahami. Sebagai 'anak kandung' dari rezim Orde Baru, pemerintahan Habibie pun mewarisi segenap watak-watak korup dan menindas dari rezim sebelumnya. Hal itu dibuktikan lewat banyaknya praktek korupsi BPPN hingga money politics Golkar dan

²⁶ Kompas, 24 Mei 1998.

²⁷ M. Amien Rais, *Melangkah Karena Dipaksa Sejarah*, Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal. 22.

PDR, serta berbagai peristiwa pembantaian mulai dari Semanggi, Aceh hingga Timor-Timur.

Apa yang pada awal era reformasi disuarakan mahasiswa atas dukungan tokoh masyarakat yakni reformasi total meliputi struktur ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan juga budaya relatif tidak dilaksanakan. Beberapa hal memang telah dilaksanakan, misalnya dalam bidang ekonomi, dengan melakukan pemberantasan terhadap bank-bank yang bermasalah yang selama ini merugikan negara. Namun hal tersebut belum menyentuh pada persoalan mendasar reformasi struktur dan ekonomi.²⁸

Pengalihan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie tidak diikuti oleh kristalisasi politik maupun usaha untuk menyelamatkan perekonomian. Sebaliknya yang tampak adalah akumulasi potensi disintegrasi politik dan magnifikansi kebangkrutan ekonomi. Dalam kondisi semacam ini praktis pilihan-pilihan kebijakan-kebijakan politik dan atau ekonomi seolah-olah menjadi sangat dilematis.

Dilema itu berakhir pada pelaksanaan Sidang Istimewa MPR atau pemilihan umum untuk reformasi untuk jangka waktu satu tahun, sangat mungkin akan mengembalikan rejim Orde Baru atau akan mengembalikan *status quo*.

Paling tidak ada beberapa persoalan yang dihadapi; *pertama*, pengalihan jabatan dari Soeharto ke Habibie menimbulkan reaksi pro dan kontra. Pemerintahan Habibie diragukan legitimasinya, bahkan sebagian masyarakat tetap menuntut Habibie mengundurkan diri. *Kedua*, krisis legitimasi telah menimbulkan krisis kepemimpinan. Dalam suasana krisis ekonomi berlarut-larut ditambah lagi krisis kepemimpinan menyebabkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat cenderung semakin tidak terkendali dan mengarah kepada situasi atau suasana *chaos*.

Lemahnya basis legitimasi Habibie direspon oleh pemerintah dengan persetujuan DPR untuk mengadakan SI MPR, walaupun keputusan SI MPR menimbulkan pro dan kontra.²⁹

4.2 Amien Rais menjelang Pemilu 1999

Setelah Soeharto lengser, sebenarnya ada niatan Amien Rais untuk kembali sepenuhnya di Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah dianggap lebih mudah daripada terjun langsung dalam panggung politik. Akan tetapi sebagian besar teman seperjuangannya dalam menuntut reformasi meminta tanggung jawab Amien Rais untuk tidak mundur begitu saja dari panggung politik. Hal diatas menunjukkan bahwa dalam diri Amien Rais pada awalnya tidak ada sedikitpun niat untuk menjadi politisi. Oleh karena itu, sebagaimana sering dikemukakan oleh Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif bahwa posisi Amien Rais dalam percaturan politik sekarang ini sepertinya dipaksa oleh sejarah. Walaupun orang menyebut kehadirannya di panggung politik di paksa oleh sejarah, namun Amien Rais sangat optimis akan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Bahkan Amien Rais semakin mantap untuk terus terjun di dunia politik walaupun rasanya sulit dan susah.

Untuk memasuki dunia politik, menurut teman dekatnya, sedikitnya ada dua alternatif yang dapat dilalui Amien Rais. Alternatif *pertama*, Amien Rais bergabung dengan salah satu partai yang sudah ada, *kedua* mendirikan partai politik sendiri.³⁰

4.2.1 Sejarah Berdirinya Partai Amanat Nasional

Kelahiran PAN dibidani oleh tokoh-tokoh gerakan reformasi yang tergabung dalam Majelis Amanat Rakyat (MAR). MAR yang berupaya

²⁸ Juri Ardiantoro F, *Transisi Demokrasi: Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pemilu 1999*, Komite Penyelenggara Pemantau Pemilu (KIPP), Jakarta, 1999, hal. 99-100.

²⁹ A. Malik Harmain dan M.F Nurhuda Y, *Op. Cit*, hal. 7-9.

menjadi wadah kerjasama berbagai organisasi dan perorangan serta berkomitmen terhadap reformasi. Bertempat di Galery Café, Jakarta pusat, MAR dideklarasikan pada 14 Mei 1998. Saat itu hadir tak kurang dari 50 tokoh nasional. Diantaranya, Amien Rais, Goenawan Mohammad, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Toety Herawati, Daniel Saparingga, Arifin Panigoro, dan Faizal Basri.

Dalam perjalanannya, perdebatan diantara para tokoh MAR tentang rencana perubahan menjadi sebuah partai politik tidak terelakkan. Akhirnya diputuskan bahwa MAR memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk membentuk partai bagi yang berminat aktif di partai politik. Sementara mereka yang tidak mau mendirikan partai dipersilahkan duduk diam di MAR.

Kelahiran PAN terkesan agak terlambat. Pasalnya, Amien Rais, salah satu tokoh inti, sempat ditawari bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun ia menolak karena merasa tidak cocok dengan visi politik yang dikembangkan partai itu. "Saya memang tidak mudah melangkah. Lebih baik mengawali langkah ragu tapi sampai pada kepastian, daripada cepat melangkah tapi ditengah jalan penuh keraguan," ucapnya.

Ketika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kesediaannya masuk majelis pakar, Amien yang memiliki keinginan untuk itu langsung menyetujuinya. Namun sikap PPP sendiri belum bulat. Ada pro dan kontra, bahkan resistensi di beberapa sayap PPP, Amien ditolak menjadi ketua PPP. "Saya harus masuk lewat proses yang membuat saya babak belur dulu. Karena itu saya lebih memilih memulai sesuatu yang sama sekali baru," papar Amien Rais.

Sementara itu tokoh MAR berhasil menyusun sebuah formatur yang bertugas menyusun platform gerakan. Mereka yang terlibat diantaranya

³⁰ Sutipyo R & Asmawi, *Op. Cit*, hal. 119-121.

Amien Rais, Syamsurizal Panggabean, Goenawan Mohammad, Zaemrotin, A.M. Fatwa, A.M. Luthfi, dan Ismid Hadad.

Pada pertemuan di Mega Mendung, Bogor, mereka sepakat untuk membentuk Partai Amanat Bangsa, namun pada akhirnya diubah menjadi Partai Amanat Nasional. Partai ini bertugas memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial. Mengedepankan faktor kemajemukan dalam mendirikan partai, Amien rais mengaktualisasikan pandangan dan sikapnya dalam prinsip dasar Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpinya. Partai ini berusaha untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita ini berakar pada moral agama, kemanusiaan dan kemajemukan. Sasarannya adalah masyarakat Indonesia yang demokratis berkeadilan sosial, otonom dan mandiri. Menginginkan tatanan manusia yang memungkinkan setiap manusia dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kebebasan. PAN memberikan kesempatan bagi setiap manusia untuk dapat berperan serta dalam kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan usaha-usaha kemanusiaan.

Partai yang didirikan oleh Amien Rais jelas didasari keinginan menghormati dan mendorong kemajemukan, karena merupakan kumpulan dari masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang etnis, suku, agama, dan gender. Prinsipnya adalah nonsektarian dan nondiskriminatif. Perbedaan suku, agama, ras yang membentuk kemajemukan masyarakat, maka PAN memberikan toleransi yang tulus agar kehidupan yang bermanfaat bisa berlangsung.³¹

Ketika PAN dideklarasikan Amien Rais pada 23 Agustus 1998, Istora Senayan, tempat berlangsungnya acara itu seolah menjadi milik Amien. Sekitar 25.000 massa seolah tersihir ketika lagu "Di Timur Matahari" dinyanyikan secara bersemangat oleh Reni Ottini, disamping panggung.

³¹ Sidarta Gautama dan Aries Budiono, *Op. Cit*, hal. 83.

Bersamaan dengan berlalunya lagu, perlahan-lahan layar putih raksasa diatas panggung diturunkan dan tampak simbol matahari berwarna putih terang dengan latar belakang biru.

Fenomena 23 Agustus itu tampaknya adalah bukti dari amat tingginya dari popularitas Amien Rais di mata masyarakat. Yang dilihat adalah dirinya, belum organisasi atau orang-orang yang mendampinginya.

PAN akhirnya menjadi tempat berlabuh Amien Rais. "Setiap warga negara, tanpa membedakan agama dan golongan, boleh menjadi anggota dan pengurus partai ini," kata Amien Rais.³²

4.2.2 Dinamika Politik Partai Amanat Nasional

Dalam melihat dinamika PAN tidak terlepas dari peran politik Amien Rais selaku pemimpin partai. Amien Rais berpandangan bahwa sebuah partai dibangun dengan maksud untuk membela kepentingan rakyat secara keseluruhan, bukan sarana untuk meraih tujuan kelompok. Oleh sebab itu, persoalan moral menjadi sangat penting dalam memperjuangkan agenda partai.

Setelah Habibie ditetapkan sebagai presiden RI ke-3, ada tiga hal yang dituntut Amien Rais, sebagai ketua PAN. *Pertama*, menyelesaikan masalah KKN secara tuntas. *Kedua*, menyelesaikan secara tuntas dan transparan kasus penembakan Trisakti, kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 1998. *Ketiga*, mengusut mantan presiden Soeharto dan keluarganya atas berbagai kesalahan yang dilakukan pada saat berkuasa.³³ Bagi Amien Rais, masalah Soeharto ini perlu diselesaikan untuk memberikan moral lesson atau 'pelajaran moral' bagi pemimpin lain agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh mantan

³² Komite Penyelenggara Pemantau Pemilu, *Profil 48 Ketua Umum Parpol RI*, PT. Kreasi Karya Wiguna, Jakarta, 1999, hal.40-47

presiden Soeharto. Dari proses peradilan yang berlangsung, nampaknya pemerintah Habibie tidak bersungguh-sungguh melaksanakan tuntutan rakyat yang dituangkan dalam TAP MPR No. 25 th.1998 dimana Soeharto dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dan dibebaskan dari tuntutan kejaksaan.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang baru diadakan pertama kali oleh PAN dimaksudkan sebagai sarana konsolidasi sekaligus menyamakan persepsi dan strategi dalam menyongsong pemilu. Rakernas menghasilkan sejumlah rekomendasi, satu diantaranya mencalonkan Amien Rais menjadi Presiden RI ke-4.³⁴

Menjelang pemilu 7 Juni 1999, kekhawatiran pemilu akan bertahannya kelompok status quo Orde Baru melalui kemenangan partai Golkar mendorong partai-partai reformis melakukan langkah-langkah bersama untuk membendung kemungkinan diatas. Bertempat di rumah ketua DPP PKB, Alwi Shihab, Ciganjur, Jakarta. Tiga tokoh partai, yaitu Amien Rais mewakili PAN, Abdurrahman Wahid mewakili PKB, dan Megawati mewakili PDI Perjuangan. Dalam hal ini Megawati tidak dapat hadir dan menyatakan persetujuannya melalui Abdurrahman wahid. Mereka bertiga mendeklarasikan sikap bersamanya, yang kemudian dikenal dengan "Komunike Paso".

Hanya beberapa hari setelah Komunike Paso dideklarasikan, Amien Rais sebagai ketua PAN bersama Hamzah Haz, Ketua PPP, dan Nur Mahmudi Ismail, Ketua Partai Keadilan mengadakan komunike bersama di Hotel Kartika Chandra, yang kemudian dikenal dengan "Komunike Kartika Chandra". Tampaknya Amien Rais merasa Komunike Paso belum cukup aman untuk menghadang munculnya status quo, sehingga ia menganggap

³³ Muhammad Najib, *Amien Rais dari Yogya ke Bina Graha, Jakarta, Gema Insani Press, 1999, hal. 74. KKN Soeharto banyak disorot oleh George Junus Aditjondro.*

³⁴ Kompas, 19 Desember 1998.

perlu bekerjasama dengan partai-partai lain yang anti status quo.³⁵ Dalam wawancara seusai acara deklarasi, Ketua Partai Keadilan (PK) Nur Mahmudi menyatakan bahwa Komunike Kartika Chandra merupakan upaya untuk mendukung Amien Rais sebagai calon presiden alternatif. Meskipun ia mengakui masalah calon presiden baru merupakan komiment PK.³⁶

Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai. Karena banyaknya calon presiden, para mahasiswa kemudian memanfaatkan era reformasi ini dengan memperkenalkan budaya baru dalam praktek demokrasi di Indonesia, yaitu debat calon presiden. Dalam kesempatan itu, Amien Rais tampil memukau dibanding dengan kandidat yang lain dan banyak menarik simpati.

4.3 Amien Rais dalam Sidang Umum MPR 1999

Sejak SI MPR menjadwalkan adanya sebuah pemilihan umum, yang dikukuhkan oleh pemerintah tanggal 7 Juni 1999, banyak kalangan masyarakat yang menggapinya dengan euphoria. Hal itu tercermin dari banyaknya kalangan yang berkepentingan membentuk partai politik. Tidak tanggung-tanggung partai-partai baru tersebut jumlahnya mencapai ratusan, meski akhirnya yang dinyatakan lolos verifikasi Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau lebih dikenal dengan sebutan "Tim Sebelas" bentukan pemerintah hanya 48 partai. Gejala merebaknya partai-partai tersebut barangkali memang cukup wajar, sebagai reaksi akan pembungkaman hak-hak berkumpul dan berorganisasi yang diberlakukan rezim Orde Baru selama 32 tahun. Dalam kaca mata demokrasi perkembangan tersebut juga dinilai tumbuhnya kesadaran berdemokrasi dalam masyarakat Indonesia.³⁷

³⁵ Gatra, 29 Mei 1999, hal 26.

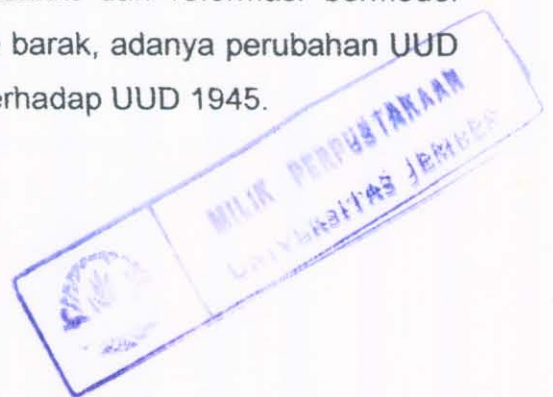
³⁶ Loc Cit.

³⁷ Juri Ardiantoro F, Op. Cit, hal. 102-103.

Pada umumnya tidak ada kejutan berarti dalam hasil yang ditunjukkan oleh pemilu 1999. Banyak pihak yang meramalkan bahwa tidak akan ada mayoritas dalam pemilu 1999 dan partai-partai yang akan keluar sebagai lima besar adalah: Golkar, PPP, PDI Perjuangan, PKB dan PAN. Hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 26 Juli 1999 menunjukkan bahwa ramalan ini benar adanya. Yang agak mengejutkan adalah perolehan suara PDI Perjuangan. Partai ini keluar sebagai partai terbesar, meskipun tidak meraih separoh dari keseluruhan kursi di DPR. Di samping itu suara yang diperoleh PDI Perjuangan (yaitu sebesar 35,7 juta), berbeda sangat jauh dengan perolehan Golkar diperingkat kedua (23,7 juta), yakni sekitar 12 juta suara. Perbedaan antara Golkar dan PKB yang merupakan pemenang ketiga (yaitu sekitar 13,3 juta) hanyalah sebanyak 10,4 juta, lebih kecil dibandingkan dengan perbedaan perolehan suara antara PDI Perjuangan dan Golkar. Perbedaan suara antara PKB dan PPP diperingkat keempat, dan antara PPP dan PAN diperingkat kelima adalah jauh lebih kecil.³⁸

Melonjaknya perolehan suara PDI-Perjuangan dan relatif sedikitnya dukungan terhadap PAN mengundang banyak tanya. Pertanyaannya, mengapa rakyat tidak memberikan suaranya untuk partai-partai reformis sejati, tetapi lebih pada partai-partai reformis yang selama ini dikenal moderat? Pemahaman tentang makna reformasi sebagaimana dilakukan oleh kalangan menengah keatas, para intelektual dan mahasiswa ternyata berbeda dengan yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Bagi sebagian kalangan menengah ke atas, reformasi berarti adanya perubahan-perubahan struktur politik yang menyeluruh. Bentuk konkrit dari reformasi bermodel demikian, antara lain militer harus kembali ke barak, adanya perubahan UUD 1945 atau paling tidak adanya amandemen terhadap UUD 1945.

³⁸ Ibid, hal. 159-161



Bagi kalangan pemilih kebanyakan, reformasi dipahami secara sederhana, yakni dengan pergantian pemegang kekuasaan, dan yang menggantikan adalah Megawati. Informasi yang menyebar di masyarakat bahwa Mega selama ini ditentang oleh Orde Baru, dan bawa Mega adalah anak Soekarno, telah menjadikan pemahaman secara sederhana ini. Demikian juga informasi bahwa Mega sederhana, tidak macam-macam, santun, semakin memperkuat dukungan terhadap anak Soekarno ini. Dalam kondisi seperti ini, pilihan terhadap PDI-Perjuangan menjadi tidak terbendung.³⁹

4.3.1 Benturan Habibie-Megawati

Pasca pemilu 1999 kembali memunculkan perdebatan dalam kancah politik, mengenai siapa yang berhak menjadi presiden. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan; *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah partai yang mendapat suara terbanyak, secara otomatis berhak atas kursi presiden. Karena suara yang diperoleh merupakan aplikasi dari keinginan rakyat yang dengan asumsi bahwa pemilu yang telah dilakukan itu identik dengan pemilihan presiden. *Kedua*, pemenang pemilu tidak otomatis menduduki presiden, karena kenyataan perolehan suara tidak mutlak (*single majority*). Maka jalan untuk bisa meraih kursi presiden harus melakukan koalisi dengan partai lain.

Hasil pemilu 1999 menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan perolehan kursi sebanyak 153 (33%) kemungkinan besar mendapat tambahan dari Utusan Daerah sebanyak 55 orang (kemenangan di 11 propinsi), kemudian disusul Golkar dengan hasil 120 kursi (23%) kemungkinan akan mendapat penambahan 70 orang dari Utusan Daerah

³⁹ Gouzali Saydan, *Op. Cit*, hal. 50.

(kemenangan di 14 propinsi), Berikutnya adalah PKB dengan 51 kursi, PPP 59 kursi dan PAN dengan 36 kursi.

Dengan munculnya PDI Perjuangan dan Golkar sebagai pemenang dalam pemilu 1999 di era reformasi, ternyata telah menimbulkan polarisasi berupa dua kubu yaitu kubu PDI Perjuangan yang menjagokan ketua umumnya Megawati sebagai calon presiden, dan kubu Habibie yang dicalonkan oleh partai Golkar untuk melanjutkan jabatan kepresidenannya. Pertarungan dua kubu ini turut meningkatkan suhu konflik politik menjelang SU MPR 1999. Untuk menggolkan masing-masing calon tersebut, para pengikut masing-masing partai juga tidak tinggal diam.⁴⁰ Golkar konon membentuk tim sukses dibawah pengaruh kelompok "Iramasuka Nusantara" untuk dapat menggolkan Habibie serta isu politik uang (money politics) yang kian marak dalam mewujudkan tujuan politiknya.

Megawati seakan-akan menjadi orang yang paling berhak menjadi presiden mendatang. Pernyataan dari hampir semua elite DPP PDI Perjuangan yang seakan naiknya Megawati sebagai presiden bagi mereka adalah suatu keharusan, sebagai harga mati, meski harus menempuh cara apapun, sehingga mengesankan arogansinya. Belum lagi ditambah dengan dukungan kesetiaan dari pendukung Megawati berupa "cap darah",⁴¹ seolah-olah hanya Megawatilah yang pantas untuk menjadi presiden. Begitu pula dalam "pidato politik"nya, 29 Juli 1999, Megawati menunjukkan sikap kurang

⁴⁰ Gouzali Saydan, Op. Cit, hal. 9.

⁴¹ Arbi Sanit, Dosen FISIPOL UI, misalnya mengomentari bahwa "cap darah" merupakan cerminan dari perilaku politik yang irrasional dan bisa membahayakan perkembangan demokrasi di Indonesia. Masih menurut Arbi Sanit, "cap darah" merupakan cermin perilaku dan pola politik yang dikembangkan oleh elite politik PDI Perjuangan dalam meraih suara dengan mengedepankan kultus individu Megawati ketimbang program. Lebih ironis lagi kultus individu ini dikaitkan dengan presiden pertama, Soekarno, yang kebetulan ayah kandung Megawati. Lihat Tekad, Nomor 36, Tahun I, 5-11 Juli 1999. Sedangkan menurut Amien Rais, "cap darah" merupakan gejala-gejala anti demokrasi, dimana pola politisi kita bukannya semakin menunjukkan kematangan demokrasi, tetapi justru mempertontonkan kenafian maupun ketidakdewasaan berdemokrasi. Lihat dalam Gouzali Saydan, Op. Cit, hal.147.

bijaksana, dengan ultimatum-ultimatum politik yang seakan dialah yang paling pantas untuk menjadi orang nomor satu di republik ini. Belum lagi soal calon legislatif yang sebagian besar non-muslim dan juga sikap “puasa bicara” yang selama ini dilakukan. Padahal dalam pandangan Amien Rais, bila Megawati sering “buka bicara” di depan publik, setidaknya akan memberi kontribusi yang positif bagi bangsa. Paling tidak Megawati bisa menasehati para pendukungnya yang cenderung arogan dan lebih mengedepankan fanatisme buta.⁴²

Polarisasi antara dua kubu ini dianggap sangat membahayakan karena masing-masing bersikukuh untuk bisa menggolkan calon presidennya dan sulit untuk dapat saling menerima antara masing-masing kubu. Misalnya, apabila Megawati menjadi presiden maka laskar pembela Habibie siap menghadang barisan massa pendukung megawati dan sebaliknya.⁴³

Walaupun PDI Perjuangan berada dalam peringkat pertama, namun demikian hasil pemilu PDI Perjuangan tidak mencapai suara mayoritas (50% plus satu) di DPR sehingga tidak secara otomatis menjadikan Megawati sebagai presiden keempat Indonesia.

Untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia Megawati seharusnya memahami realitas politik yang berkembang di masyarakat, bahwa disamping banyak yang berempati kepada partainya, juga tidak sedikit yang tidak seaspirasi dengan munculnya Megawati sebagai presiden. Hal ini berkaitan dengan kemampuan pribadi, prestasi, akseptabilitas dan ideologi sebagai kriteria untuk menilai kadar calon pemimpin di samping satu hal yang penting adalah mengakomodir kekuatan politik mayoritas. Megawati seharusnya

⁴² Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit*, hal. 302

⁴³ Irma Riyanti, *Peran Kekuatan Poros Tengah dalam Kemenangan K.H Abdurrahman Wahid pada Pemilihan Presiden 1999 Di Indonesia*, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2000, hal. 58.

membuka kompromi politik dengan kelompok Islam menuju peran dan kedudukan politik yang seimbang.⁴⁴

Selain itu ada hal yang lebih utama yang harus diperhatikan oleh Megawati yaitu berkaitan dengan tema-tema di era reformasi. Sebuah partai yang reformis ditentukan oleh visi, misi dan program reformasi yang akan dijalankan. Setidaknya ada beberapa parameter untuk menentukan reformis tidaknya suatu partai politik. *Pertama*, apakah partai tersebut mendukung amandemen UUD'45? Parameter ini penting karena sistem yang dibangun oleh konstitusi kita masih memerlukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan perkembangan jaman.

Kedua, sikap partai terhadap keberadaan dwi fungsi ABRI. Mempertahankan atau merombak? Partai yang reformis semestinya akan meninjau kembali posisi TNI ini, sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan peran dwifungsi yang dapat menghambat reformasi. *Ketiga*, sikap terhadap pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroni-kroninya yang diduga terlibat KKN. *Keempat*, sikap terhadap pemilihan presiden secara langsung. Partai yang reformis pasti mendukung mekanisme pemilihan presiden secara langsung, karena mekanisme melalui MPR seperti yang selama ini dilakukan cenderung memberi peluang presiden terpilih untuk terpilih lagi di periode berikutnya. *Kelima*, sikap terhadap sistem pemilihan umum distrik atau proporsional? Hampir semua negara dalam trensisi menuju demokrasi mendukung sistem distrik yang dikombinasikan dengan proporsional agar sisa suara tidak terbuang.⁴⁵ Megawati cenderung bersikap diam terhadap berbagai persoalan kebangsaan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Amien Rais, bahwa Megawati lebih banyak diam sehingga

⁴⁴ Andi Setiono dkk, *Tragedi Megawati: Revisi Politik Massa Indonesia*, Tarawang, Yogyakarta, 2000, hal. 77.

⁴⁵ Gouzali Saydan, *Op. Cit*, hal. 71-73.

masyarakat Indonesia tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh calon presiden ini.⁴⁶

Habibie yang didukung oleh Golkar sebagai peringkat kedua dalam perolehan suara pada pemilu 1999 banyak bermasalah sehubungan dengan masa kepemimpinannya sebagai presiden. Yang paling berat dan sulit diterima oleh rakyat Indonesia adalah kroni lapis pertama mantan presiden Soeharto. Adapun Habibie secara terang-terangan menyebut Soeharto sebagai guru terbaik sekaligus orang tua. Karena itu, sangatlah wajar apabila banyak orang yang menganggap Habibie tidak lepas dari pengaruh Soeharto sehingga Habibie menemui kesulitan ketika harus mengusut dugaan KKN yang dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya.⁴⁷

Masalah Timor-Timur adalah masalah terbesar bagi Habibie karena propinsi termuda ini bagaikan duri dalam daging sejak bergabung dengan Indonesia. Habibie membuat kebijakan dengan memberikan dua opsi bagi warga Timor-Timur yaitu bergabung dengan otonomi luas atau merdeka. Sepintas opsi ini diyakini akan menyelesaikan konflik berkepanjangan di Timor-Timur, namun justru menimbulkan disintegrasi bangsa.

Konstelasi politik yang terjadi kemudian adalah PDI Perjuangan mencalonkan Megawati dan Golkar tetap mencalonkan Habibie. Munculnya dua nama tersebut nampaknya menganggap tidak mengakomodir partai lain yang kemudian memunculkan aliansi yang terkenal dengan nama poros tengah, sebagai bentuk jalan tengah antara Habibie dan Megawati, yang mencalonkan KH. Abdurrahman Wahid. Manuver-manuver politik telah dilakukan oleh masing-masing partai untuk menggolkan calon presiden yang diunggulkannya. Gus Dur bahkan pernah mengatakan secara transparan bahwa Megawati akan menjabat presiden, Gus Dur di MPR dan Amien Rais

⁴⁶ Gatra, 3 Juli 1999.

yang akan duduk di DPR. Tawaran power sharing itu sebagai langkah untuk mencegah masuknya kelompok status quo. Munculnya poros tengah sebagai penolakan terhadap dua kandidat presiden yang telah muncul sebelumnya, Habibie dianggap sebagai produk dari pemerintahan status quo dan dimungkinkan dapat mengembalikan kekuasaan status quo tersebut, dan Megawati bukan merupakan representasi dari umat Islam.⁴⁸

4.3.2 Terbentuknya Poros Tengah

Pemilu 7 juni 1999 menghasilkan tujuh partai peraih suara terbesar, dengan urutan perolehan kursi DPR sebagai berikut: PDI Perjuangan, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB dan PK. Tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak, yakni memperoleh lebih dari lima puluh suara pemilih. Ini memaksa baik PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak pertama (153 kursi DPR), maupun Golkar sebagai peraih suara terbanyak kedua (120 kursi DPR), untuk bekerja keras memperoleh dukungan dari partai lain agar bisa memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan presiden.⁴⁹

Koalisi politik pasca pemilu adalah suatu keniscayaan yang harus terjadi di Indonesia dimana keperluan koalisi tidak hanya dilandasi fakta politik yang terjadi yakni tidak ada satupun partai yang mampu memperoleh suara mayoritas dalam sistem multi partai namun juga didasari keinginan politik yang kuat untuk melanggengkan kepentingan bersama baik berkaitan dengan ikatan ideologis maupun agenda politik yang sama. Koalisi politik menyebabkan terjadinya pola keseimbangan politik partai-partai besar yang akan memainkan peranannya dalam SU MPR.

⁴⁷ Panji Masyarakat, 18 Agustus 1999, hal. 64.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 29

⁴⁹ Jumlah keseluruhan kursi DPR yang diperebutkan adalah 452. Suasana dan analisa situasi sesudah hasil Pemilu 7 Juni 1999 diumumkan dapat dibaca pada Panji Masyarakat No. 10 Tahun III, 23 Juni 1999. Masalah posisi masing-masing partai dalam penghitungan akhir suara dapat dilihat pada tabloid Tekad, No. 38/Tahun I, 19-25 Juli 1999.

Kalangan Islam politik yang terdiri dari PBB, PPP dan PK menilai bahwa agenda reformasi belum sepenuhnya dijalankan oleh PDI Perjuangan. Mereka menengarai munculnya kelompok *status quo* baru sebagai suatu kelompok besar karena memanfaatkan momentum reformasi yang pada hakekatnya mempertahankan *status quo*. Sebagai upaya untuk menghadang *status quo* dan terbebas eskalasi politik akibat kristalisasi dua calon presiden terkuat yaitu Megawati dan Habibie, serta menghindari *dead lock* pada saat SU MPR kelompok Islam mencoba mengambil jalan tengah yang kompromis dengan menawarkan koalisi antara partai-partai Islam atau dengan partai-partai lain yang memiliki kepentingan yang sama.

Momentum koalisi antara partai-partai Islam dan tawaran untuk mengadakan koalisi dengan partai lain yang mempunyai kepentingan yang sama inilah yang dinilai oleh penggagas poros tengah, Amien Rais sebagai awal yang baik bagi terwujudnya kekuatan poros tengah yang solid. Hal ini seiring dengan posisi PAN sebagai partai terbuka dan membawa agenda reformasi untuk menerima koalisi partai untuk menerima tawaran koalisi tersebut. Sebagai partai terbuka dan berbasis massa Islam, PAN dengan 34 kursi mempunyai kesempatan untuk berkoalisi dengan partai manapun seperti halnya PKB jauh hari telah mengadakan koalisi dengan PDI Perjuangan. Namun demikian dalam politik dapat terjadi perubahan dengan cepat sehingga tidak menutup kemungkinan bagi PKB untuk berkoalisi dengan PAN dan partai-partai Islam sehubungan dengan suatu kepentingan politik.

Pada tanggal 24 Juli 1999, Amien Rais mensosialisasikan konsep poros tengah dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh partai Islam yang telah menawarkan koalisi dengan partainya di kantor DPP PPP. Acara ini dihadiri oleh Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Marjono (PBB), Hamzah Haz (PPP), K.H Yusuf Hasyim (PKU) dan Nur Mahmudi Ismail (Partai Keadilan). Pada pertemuan itu dibahas berbagai topik yang berkembang

pasca penghitungan hasil pemilu yang berkaitan dengan agenda reformasi dan polarisasi antara kubu Megawati dan Kubu Habibie.

Poros tengah sebagaimana dijelaskan oleh Amien Rais juga mempunyai prinsip-prinsip. *Pertama*, poros tengah menjadi kekuatan yang bersifat menggalang seluruh elemen-elemen patriotisme, nasionalisme dan kekuatan-kekutan agama yang melebur dalam sebuah wacana dan wujud politik yang terbuka (inklusif), lentur dan jauh dari sikap-sikap otoriter. *Kedua*, poros tengah merupakan wadah seluruh anak bangsa, tidak pandang bulu dari manapun latar belakang, ormas maupun partai politiknya. Dan *ketiga*, poros tengah merupakan terobosan demokratik yang juga diharapkan patuh terhadap permainan demokrasi yang ada.⁵⁰

Ternyata partai-partai diluar PDI Perjuangan dan Golkar yang memperoleh suara cukup besar, seperti PPP, PKB, PAN, PBB, PK dan beberapa partai Islam lain, jika kursi-kursi ini digabung, jumlahnya dapat mencapai 170 kursi DPR, melebihi kekuatan PDI Perjuangan atau Golkar. Kecuali PKB yang agak dekat dengan PDI Perjuangan, partai-partai ini umumnya memiliki hambatan serius untuk mendukung baik Megawati maupun Habibie. Disisi lain, memiliki sikap yang sama dalam memandang agenda reformasi.⁵¹

Ide "poros tengah" dikemukakan oleh Amien Rais guna menyelamatkan masa depan bangsa. Amien memiliki alasan sendiri mengapa ia mendukung sosialisasi dan mencari dukungan untuk poros tengah. *Pertama*, ia khawatir dengan polarisasi dan persaingan antara pendukung Megawati dan Habibie yang telah memainkan isu yang sensitif, yaitu Islam. Muncul kesan kuat di masyarakat, kompetisi Megawati versus Habibie seolah-olah merupakan pertarungan kelompok sekuler dan non

⁵⁰ Ma'mun Murod Al-Brebesy, *Op. Cit*, hal. 297.

⁵¹ Muhammad Najib, *Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*, *Op.Cit*, hal. 165-167

muslim versus umat Islam. Hal ini tentu akan membahayakan demokrasi di masa yang akan datang, karena akan menimbulkan saling kecurigaan yang berkepanjangan. Sedangkan demokrasi hanya dapat dibangun diatas sendi-sendi obyektifitas, meritokrasi dan saling percaya diantara komponen bangsa.

Kedua, baik kubu Habibie maupun kubu Megawati tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengakomodasi dan mengagendakan tuntutan reformasi. Kerena itu perlu alternatif lain yang lebih menjamin integrasi bangsa di satu sisi dan pelaksanaan agenda reformasi di sisi lain.⁵²

Hanya dengan poros tengah yang berjiwa reformasi dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, maka persetujuan antara kubu Megawati dan kubu Habibie dapat dinetralisasi.⁵³

4.3.3 Amien Rais terpilih menjadi Ketua MPR periode 1999-2004

Pada masa orde baru, keputusan tentang materi sidang maupun persoalan pimpinan MPR dilaksanakan melalui kesepakatan musyawarah untuk mufakat atau secara aklamasi antar fraksi-fraksi. Keadaan ini mengalami perubahan total di era reformasi yaitu diawali dengan lobi-lobi atau tawar-menawar antar fraksi dengan saling pengertian sebelumnya tetapi keputusan terakhir diambil melalui pemilihan secara bebas dan rahasia oleh masing-masing anggota MPR atas dasar satu orang satu suara (*one man one vote*).

Bertepatan dengan hari ketiga SU MPR, Amien Rais sebagai ketua PAN terpilih menjadi ketua MPR secara demokratis dan terbuka. Amien Rais sebagai calon dari fraksi reformasi (koalisi PAN dan Partai Keadilan) mengumpulkan 305 suara dari 650 suara anggota MPR dan mengalahkan Matori Abdul Jalil sebagai calon dari fraksi PKB memperoleh 297 suara. Sedangkan calon lainnya Hari Subarno, (fraksi TNI/Polri) dengan 41 suara,

⁵² Ibid, hal. 167.

GINANJAR Kartasasmita (fraksi Golkar) 10 suara, KWIEK Kian Gie (fraksi PDI-P) 5 suara, NAZRI Adlani (fraksi utusan golongan) 5 suara, HUSNI Thamrin (fraksi PPP) 2 suara, YUSUF Amir Faisal (fraksi PBB) 1 suara dan tiga suara abstain. Ketujuh pesaing Amien Rais secara otomatis menduduki wakil ketua MPR.⁵⁴

Pada awalnya Amien Rais hanya dipersiapkan untuk dipromosikan menjadi Ketua DPR RI oleh sesama anggota DPR dari PAN. Ide ini kemudian mendapat dukungan dari kelompok Poros Tengah.⁵⁵ Dalam pertemuan awal pada hari Minggu antara Hamzah Haz, Amien Rais, dan Akbar Tandjung disepakati bahwa Golkar akan mendukung Poros Tengah untuk menjadikan Hamzah Haz sebagai Ketua MPR. Hal sebaliknya harus dilakukan Poros Tengah saat pemilihan pimpinan DPR, yaitu Poros Tengah mendukung Golkar untuk menjadikan Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR.

Namun, menjelang Rapat Paripurna III dengan agenda pembentukan fraksi, kesepakatan itu menjadi goyah. Sebab, masing-masing pihak ragu dengan komitmen pihak lain. Untuk meyakinkan bahwa skenario awal harus berjalan, Amien meyakinkan bahwa tidak perlu memikirkan posisi untuk dirinya, yang penting Hamzah Haz harus mendapat tempat sebagai Ketua MPR.

Sempat terjadi tawar-menawar antara kubu PDI-P –PKB dan Golkar-Poros Tengah. Untuk menggejolakkan Amien, Golkar melobi Ketua Umum PPP Hamzah Haz yang semula diunggulkan sebagai ketua MPR. Niat Amien menjadi ketua MPR datang mendadak, setelah kelalaian Poros Tengah mengajukan pencalonan Gus Dur. Sebagai anggota dari Utusan Golongan, Gus Dur ternyata tidak dicalonkan oleh fraksinya, tata tertib mensyaratkan calon pimpinan harus dicalonkan oleh fraksi masing-masing. Situasi inilah yang membuat Poros Tengah mencari alternatif lain. Masuknya nama

⁵³ Gouzali Saydan, *Op. Cit*, hal. 146.

⁵⁴ Kompas, 4 Oktober 1999

⁵⁵ Muhammad Najib, *Op. Cit*, hal. 183.

Hamzah Haz, yang juga diunggulkan Golkar bertahan tidak lama. Karena diperhitungkan nama Hamzah Haz kurang bisa diandalkan jika dihadapkan dengan Matori. Semula Amien menolak dicalonkan sebagai Ketua MPR, karena ia lebih mantap menjadi Ketua DPR. Disini kompromi terjadi, Amien membatalkan niatnya, karena Golkar menginginkan Akbar sebagai Ketua DPR. Pembatalan ini didasarkan pada perhitungan: jika Amien dan Akbar sama-sama mencalonkan diri, maka keduanya akan kalah. Suara Golkar dan Poros Tengah akan pecah, dan akibatnya PDI-P dan PKB akan menarik keuntungan.⁵⁶

Usai rapat Paripurna III menjelang pelaksanaan rapat Paripurna IV, kembali Amien, Hamzah dan Akbar Tandjung bertemu. Hasil pertemuan ini dikonsultasikan dengan Gus Dur. Telepon antara Gus Dur dan Akbar membuat pencalonan Amien makin mengkrystal. "Bismillah, dukung Mas Amien saja," kata Gus Dur. Gus Dur setuju jika Amien menjadi Ketua MPR, dan Hamzah Haz Wakil Ketua DPR. Ini adalah posisi awal, sebab pada saatnya Akbar akan mendapat posisi sebagai Wapres, sehingga Hamzah Haz menjadi Ketua DPR.⁵⁷

Menurut sekjen PPP Ali Marwan Hanan, sebelum menetapkan pilihan Amien Rais sebagai ketua MPR, terjadi tawar-menawar antara poros tengah dengan Golkar. Poros tengah mengadakan lobi politik terhadap Golkar dengan mengetengahkan dua skenario. *Skenario pertama*, Hamzah Haz sebagai ketua MPR, Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR dan Amien Rais sebagai wakil ketua DPR. Dengan catatan setelah pemerintah terbentuk, Akbar Tandjung akan berada pada lembaga eksekutif dan Amien Rais naik menjadi ketua DPR, Namun skenario pertama mendapat penolakan karena apabila Amien Rais dan Akbar Tandjung pada posisi DPR dapat memecah suara poros tengah dan Golkar. Untuk posisi ketua MPR, Hamzah Haz

⁵⁶ Panji Masyarakat, No. 26 Tahun III, 13 Oktober 1999, hal. 24-25

melawan bertarung melawan Matori Abdul Jalil dan dikarenakan suara PPP tidak bulat mencalonkannya sebagai ketua MPR. Kemudian *skenario kedua*, seperti yang dijalankan dalam rapat paripurna IV, Amien Rais sebagai ketua MPR, Akbar Tandjung sebagai ketua DPR dan Hamzah Haz sebagai wakil ketua DPR. Seharusnya pada *skenario kedua* ini untuk ketua MPR adalah GUS Dur, akan tetapi Gus Dur tidak dicalonkan oleh fraksi utusan golongan karena fraksi utusan golongan mengetengahkan Nazri Adlani. Satu jam sebelum pemilihan MPR nama Amien Rais muncul sebagai calon ketua MPR.⁵⁸

Terpilihnya Amien Rais sebagai ketua MPR mengalahkan Matori Abdul Jalil telah menunjukkan isyarat tentang proses pengelompokan dalam SU MPR dan lebih jauh lagi terjadi pola aliansi antara fraksi-fraksi MPR. Kekalahan koalisi PDI-Perjuangan dan PKB pada voting penentuan agenda SU MPR belum secara signifikan sebagai pengelompokan suara dalam MPR. Hasil voting dapat ditafsirkan sebagai indikator pola pengelompokan suara apabila yang dipilih adalah personalia pimpinan.

Dengan terpilihnya motor penggerak poros tengah Amien Rais sebagai ketua MPR, menunjukkan bahwa kekuatan poros tengah dapat diperhitungkan sebagai posisi penyeimbang yang menentukan dalam SU MPR 1999. Menggambarkan kemenangan Amien, harian *Republika* dalam tajuknya dengan judul "Kemenangan Reformasi" menulis:

"Kita bersyukur, proses pemilihan Ketua MPR berlangsung demokratis, sangat terbuka, dan tidak ada keraguan untuk itu. Kini dengan terpilihnya Amien Rais, kita menaruh keyakinan bahwa ruang untuk demokrasi dan kelanjutan tuntutan reformasi terbuka lebar."⁵⁹

Kekompakan poros tengah sebenarnya mulai tampak ketika mereka berinisiatif menyelenggarakan pertemuan di Ciganjur dua minggu sebelum SU MPR berlangsung. Selain PAN, PPP, PK, PBB sebagai kekuatan poros

⁵⁷ Kompas, 4 Oktober 1999.

⁵⁸ Panji Masyarakat, *Ibid*, hal. 28.

tengah pada pertemuan itu hadir pula PKB dan Golkar. Kemudian pertemuan ini lebih dikenal sebagai 'tim tujuh' minus PDI-Perjuangan yang bertujuan untuk mereduksi kemungkinan *deadlock* dalam SU MPR dan sepakat untuk membentuk tim penyusun dan rancangan tata tertib dan jadwal SU MPR. Pertemuan rutin tim tujuh yang melibatkan Amien Rais, Gus Dur Alwi Shihab, Yusril Ihza Mahendra, Nur Mahmudi Ismail, Feisal Basri, Tosari Wijaya, dan Fuad Bawazier dapat dijadikan indikator kemampuan lobi politik poros tengah kepada PKB maupun Golkar.

Meskipun hampir semua tokoh dan media massa menyambut positif terpilihnya Amien Rais sebagai Ketua MPR, namun diantaranya masih mencurigainya. Posisi Ketua MPR hanyalah target untuk meraih jabatan presiden. Kecurigaan semacam ini dibantah Amien Rais secara tegas. Dalam wawancaranya dengan harian *Republika*, ketika ditanya, "Anda merasa sudah cukup menjadi Ketua MPR?" dengan tegas Amien menjawab:

"Saya betul-betul sudah bersyukur diberi amanat menjadi Ketua MPR. Anda bisa bayangkan suara PAN hanya 7,2 persen, tapi bisa duduk sebagai Ketua MPR. Saya percaya itu betul-betul hasil campur tangan yang diatas sana, saya mungkin termasuk orang beriman yang masih percaya adanya kekuatan rekayasa yang Mahabesar dari Allah SWT."⁶⁰

Bantahan senada diulanginya ketika ia, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR, menerima Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) yang dipimpin oleh mantan Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad.⁶¹

⁵⁹ "Tajuk", *Harian Republika*, 5 Oktober 1999.

⁶⁰ Pernyataan yang tegas dan lugas tentang tidak adanya niat lagi untuk ikut bertarung memperebutkan kursi Presiden setelah mendapat amanat sebagai Ketua MPR, dapat dibaca dalam wawancaranya dengan harian *Republika*, 10 Oktober 1999.

⁶¹ Bantahan Amien Rais ini diungkap oleh harian *Kompas*, 12 Oktober 1999.

BAB V KESIMPULAN

Gagasan suksesi yang diperkenalkan oleh Amien Rais menimbulkan reaksi pro dan kontra, serta sempat dibekukan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah 1993. Selanjutnya suksesi banyak berkembang pada generasi muda. Munculnya krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi, dimana pemerintahan yang sedang berkuasa banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang justru semakin memberikan peluang pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebagai respon atas kondisi seperti ini, Amien Rais menuntut adanya suksesi kepemimpinan nasional, paling tidak tahun 1998. Tuntutan ini banyak didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama dari kalangan mahasiswa dan kaum intelektual. Gerakan menuntut reformasi terus bergulir, akhirnya Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Habibie.

Setelah Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, Amien Rais ingin kembali pada Muhammadiyah. Akan tetapi sebagian besar teman seperjuangan dalam menuntut reformasi, meminta Amien Rais agar tidak mundur dalam mewujudkan reformasi. Selanjutnya Amien Rais mendirikan Partai Amanat Nasional yang berprinsip pada non-sektarian dan non-diskriminasi. Prinsip ini berakar pada pemikirannya tentang tauhid sosial dimana tidak lagi mengenal diskriminasi manusia atas dasar suku, etnis, agama, adat-istiadat, dan lain-lain. Sebagai ketua partai Amien Rais banyak memberikan kontribusi pada pemerintahan Habibie, baik itu berupa kritik maupun pemikiran politik.

Keinginan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia merupakan dasar bagi Amien Rais dalam melakukan reformasi. Dimana demokrasi

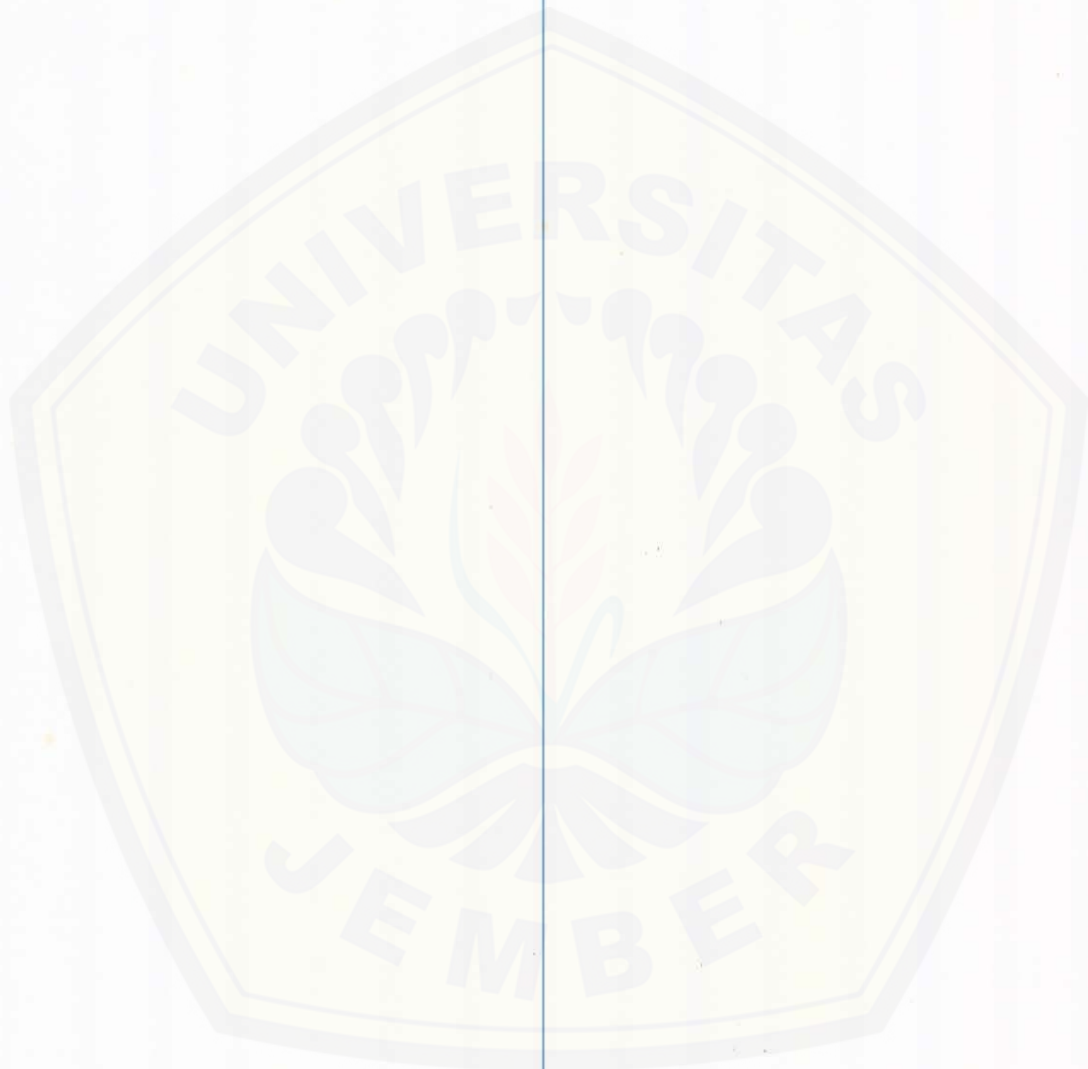
dijadikan sebagai preferensi utama dalam pengelolaan suatu negara, karena sistem ini dianggap paling baik untuk saat ini. Demokrasi dipandang mampu menjamin berlangsungnya check and balance antara mereka yang sedang berkuasa dengan mereka yang tidak sedang berkuasa. Dalam hal ini Amien Rais menjadi sparing partner terhadap pemerintahan Habibie, dalam era transisi ini terdapat kemandegan proses demokrasi dan redemokrasi, dan Amien Rais mengupayakan agar pemerintahan yang cenderung mendukung adanya status quo ini tidak lagi berkuasa dalam periode berikutnya.

Pasca pemilu 1999, Amien Rais menawarkan gagasan poros tengah untuk mengantisipasi terjadinya polarisasi antara kubu Megawati dan kubu Habibie sehubungan dengan pencalonan presiden, kedua kubu ini dianggap memiliki kesamaan yaitu mendukung adanya status quo dan tentunya bertentangan dengan prinsip demokrasi. Kekuatan poros tengah ini berfungsi sebagai penyeimbang yang mempunyai bargaining power strategis dalam SU MPR 1999. Poros tengah terdiri dari koalisi antara PAN dan partai-partai Islam.

Pada waktu SU MPR, terjadi tawar-menawar antara poros tengah dengan Golkar. Semula Amien Rais menolak dicalonkan sebagai ketua MPR, tetapi karena adanya kelalaian dalam mencalonkan Gus Dur sebagai Ketua MPR, maka Amien Rais yang dipandang sebagai sosok yang reformis dicalonkan oleh poros tengah sebagai Ketua MPR, agar pencalonan Amien Rais ini semakin solid, poros tengah meminta pendapat dari Gus Dur, selanjutnya Gus Dur setuju jika Amien Rais sebagai Ketua MPR. Hampir semua tokoh dan media massa menyambut positif terpilihnya Amien Rais sebagai ketua MPR.

Sebelum munculnya gagasan poros tengah, sebenarnya telah muncul gagasan-gagasan serupa, seperti "Komunike Paso" yang melibatkan PKB, PAN, dan PDI Perjuangan, dan juga "Komunike Kartika Chandra" yang melibatkan PAN, PPP, dan PK, gagasan-gagasan sebelumnya memiliki

anggota yang tidak jauh berbeda dengan mereka yang berada dalam poros tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Arief. 1996. *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Asmawi, Sutipyo R. 1999. *PAN: Titian Amien Rais Menuju Istana*. Yogyakarta: Titian Illahi Press.
- Fauzi, Ibrahim Ali. 1997. *Ada Udang di Balik Busang: Dokumen Pers Kasus Amien Rais*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Gautama, Sidarta, Aries Budiono. 1999. *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih Menurut 4 Tokoh Reformasi: Amien Rais, Emil Salim, Nurcholis Madjid, Yusril Ihza Mahendra*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gie, Liang. 1984. *Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*. Yogyakarta: FISIP UGM.
- Greenstein, Fred I. 1970. *Personality and Politics: Problem of Evidence, Influence, Conceptualization*. Chicago: Markham Publishing Company.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Harmain, A. Malik, M.F Nurhuda Y. 2000. *Mengawal Transisi: Refleksi Atas Pemantauan Pemilu 1999*. Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (JAMPPI – PB PMII).
- Komite Penyelenggara pemantau Pemilu. 1999. *Profil 48 Ketua Umum Parpol RI*. Jakarta: P.T Kreasi Karya Wiguna.
- Mas'ood, Mochtar. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Yogyakarta: LP3S.
- Mas'ood, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teoritism*. Yogyakarta: UGM.

- Murod, Ma'mun. 1999. *Menyingkap Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Najib, Muhammad. 1998. *Amien Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 1999. *Amien Rais dari Yogya ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , 1999. *Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais*. Serambi Ilmu Semesta.
- Perrine, Laurence. 1988. *Literature, Structure, Sound and Sense*. San Diego: Harcourt Braco Javanovich Publishers.
- Plano, Jack C. 1982. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Rais, M. Amien. 1996. *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan Pustaka.
- , 1998. *Melangkah Karena Dipaksa Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- , 1998. *Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- , 1998. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Saydan, Gouzali. 1999. *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia: Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiono, Andi. 2000. *Tragedi Megawati: Revisi Politik Massa Indonesia*. Yogyakarta: Tarawang.
- Surachmad, Winarno. 1975. *Dasar dan Teknik Research*. Bandung: CV. Tarsito.

- Riyanti, Irma. 2000. *Peran Kekuatan Poros Tengah dalam Kemenangan KH. Abdurrahman Wahid pada Pemilihan Presiden 1999 di Indonesia*. Universitas Jember: Skripsi.
- Tim LIP FISIP UI. 1998. *Mengubur Sistem Politik Orde Baru: Reformasi Undang-Undang Partai Politik*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Trimansyah, Bambang. 1998. *Episode Sang Oposan: Lokomotif itu Bernama Amien Rais*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.
- Uhlin, Anders. 1998. *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Wahid, Marzuki. 1999. *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsiran Makna*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Majalah

- Forum Kedilan. 6 Juni 1999.
- Gatra. 6 Juni 1998.
- , 29 Mei 1999.
- , 3 Juli 1999.
- Panji Masyarakat. 18 Agustus 1999.
- , 13 Oktober 1999.
- Tekad, 19 Juli 1999.
- Ummat. 5 Januari 1996.

Koran

- Kompas. 16 Februari 1998.
- , 17 Maret 1998.
- , 12 Mei 1998.
- , 19 Desember 1998.
- , 15 Mei 1999.
- , 4 Oktober 1999.

-----, 12 Oktober 1999.

Republika. 1 Agustus 1998.

-----, 5 Oktober 1999.

-----, 10 Oktober 1999.

Internet:

A:\catcha.com-

<http://www.kompas.com/9802/13/UTAMA/amin.htm>.[tablighakbar.htm](http://www.kompas.com/9802/13/UTAMA/tablighakbar.htm)

A:\diskusi.yahoo.htm/<http://www.washington.kbri.pro/CarakaOnline>

